

Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur

2018



Statistik Perumahan dan Permukiman

Provinsi Jawa Timur

2018



Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2018

ISBN : 978-623-91074-5-1
Katalog : 3302001.35
No Publikasi : 35520.1907

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : xii + 53 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Jawa Timur

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Jawa Timur

Desain Sampul :
Bidang Statistik Sosial
BPS Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan Oleh :
© BPS Provinsi Jawa Timur

Dicetak oleh : PT Sinar Murni Indo Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Tim Penyusun

Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2018

Pengarah :

Teguh Pramono, MA.

Penanggung Jawab Umum :

Asim Saputra, SST, M. Ec. Dev.

Penanggung Jawab Teknis :

Hermanto, S.Si., M.S.E.

Editor :

Hermanto, S.Si., M.S.E.

Penulis dan Pengolah Data :

Suwito, S.E., M.M.

Daizy Pangeswari, S.E., M.M.

Natria Nur Wulan, S.Si.

Desain/Layout :

Suwito, S.E., M.M.

KATA PENGANTAR

Dalam rangkaian proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pemantauan kemajuan yang berkesinambungan dan melihat hasil evaluasi pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan harus selalu didasari dari data. Salah satunya adalah data sosial ekonomi yang sangat diperlukan untuk mendukung rangkaian proses tersebut. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang bertujuan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk Jawa Timur dengan pendekatan rumah tangga, dapat digunakan sebagai salah satu rujukan data pendukung dalam perencanaan pembangunan. Dalam buku Statistik Perumahan dan Pemukiman Jawa Timur 2018 ini merupakan laporan ringkas mengenai kondisi perumahan dan pemukiman di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2018.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi para pengguna data, serta pengambil kebijakan di bidang perumahan dan permukiman, dalam rangka merencanakan, memantau dan menilai hasil-hasil pembangunan di bidang terkait apakah telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam terwujudnya laporan eksekutif ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang membangun akan sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya.

Demikian, semoga laporan eksekutif ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Agustus 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Timur


Teguh Pramono, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN TABEL	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika penulisan	3
II. METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Susenas	5
2.2. Konsep dan Definisi	5
III. ULASAN RINGKAS.....	13
3.1. Umum	13
3.2. Status Penguasaan Tempat Tinggal	12
3.3. Kondisi Fisik Bangunan Rumah Tinggal.....	16
3.3.1. Luas Lantai.....	16
3.3.2. Kualitas Atap Rumah/Bangunan Terlulus	18
3.3.3. Kualitas Dinding Rumah/Bangunan Terlulus	19
3.3.4. Kualitas Fasilitas BAB yang Digunakan.....	20
3.3.5. Jenis Kloset yang Digunakan	22
3.3.6. Kualitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja	23
3.3.7. Kualitas Sanitasi yang Digunakan Rumah Tangga	24
3.4. Kualitas Sumber Air Rumah Tangga.....	26
3.4.1. Kualitas Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga.....	26
3.4.2. Jarak Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat.....	28
3.4.3. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	29
3.4.4. Cara Memperoleh Air Minum	30

3.5. Penggunaan Bahan Bakar Utama untuk Memasak	31
3.6. Sumber Penerangan Utama	33
Lampiran Tabel	35

<https://jatim.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal dan Wilayah di Jawa Timur, 2018..... 14
Gambar 2	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal dan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Timur, 2018 16
Gambar 3	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/ Bangunan yang Ditempati di Jawa Timur, 2017-2018 17
Gambar 4	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan yang Ditempati dan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Timur, 2018 18
Gambar 5	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Atap di Jawa Timur, 2018..... 19
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Rumah Tinggal di Jawa Timur, 2017-2018 20
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas BAB di Jawa Timur, 2017-2018 21
Gambar 8	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Jawa Timur, 2017-2018..... 23
Gambar 9	Persentase Rumah Tangga menurut Kelayakan Sarana Sanitasi di Jawa Timur, 2017 – 2018 25
Gambar 10	Persentase Rumah Tangga menurut Akses Sanitasi Layak dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Jawa Timur, 2018 26
Gambar 11	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang Digunakan dan Wilayah di Jawa Timur, 2018 27

Gambar 12	Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Jawa Timur, 2018	28
Gambar 13	Persentase Rumah Tangga menurut Akses Air Minum Layak di Jawa Timur, 2017 – 2018	30
Gambar 14	Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum di Jawa Timur, 2017-2018.....	31
Gambar 15	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan Memasak dan Wilayah di Jawa Timur, 2018	32
Gambar 16	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Wilayah di Jawa Timur, 2018	33
Gambar 17	Rumah Tangga menurut Rata-rata Konsumsi Listrik KWH dan Rupiah Perkapita Sebulan serta Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Jawa Timur, 2018	34



DAFTAR LAMPIRAN TABEL

	Halaman
Tabel 1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018	37
Tabel 2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan Tempat Tinggal per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018	38
Tabel 3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018.....	39
Tabel 4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018.....	40
Tabel 5 Persentase rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018.....	41
Tabel 6 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018.....	42
Tabel 7 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018.....	43
Tabel 8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2016-20 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk	

ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018	44
Tabel 9 Persentase Rumah Tangga Dibedakan menurut Sanitasi Layak/Tidak Layak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017- 2018.....	45
Tabel 10 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018	46
Tabel 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018	47
Tabel 12 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018	48
Tabel 13 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak/Tidak Layak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017- 2018	49
Tabel 14 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018	50
Tabel 15 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Utama Untuk Memasak ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018	51
Tabel 16 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018	52
Tabel 17 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan Utama Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018	53



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1), menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa. Ini berarti negara bertanggung jawab melindungi segenap warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan perumahan dan permukiman bagi warga negara Indonesia agar dapat bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sehat dan aman.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat biasanya diukur bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar, sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi pasangan keluarga baru sebagai rumah tinggal. Sebagai tempat tinggal idealnya memiliki fasilitas kamar tidur, mandi, dapur, jamban (WC) tersendiri, di samping fasilitas penerangan, sumber air bersih untuk minum, memasak dan mandi/cuci/dll.

Di samping kebutuhan rumah yang sehat, lingkungan yang bersih dan sehat jauh dari polusi udara merupakan harapan sebagian besar penduduk. Namun demikian kondisi ideal ini sulit didapatkan karena kendala ketersediaan lahan permukiman yang terbatas dan selalu berkurang, tidak berimbang dengan pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Hal ini utamanya dirasakan di wilayah perkotaan yang memiliki lahan terbatas dengan jumlah penduduk yang padat dan selalu bertambah setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak terhadap pembangunan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengatur dan menata ketersediaan permukiman bagi penduduk. Sehingga permasalahan *housing*



backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diminimalkan.

Pemukiman yang padat penduduk berpotensi menimbulkan efek negatif yang cukup besar terhadap permasalahan sosial ekonomi bagi warga yang tinggal di dalamnya. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga memicu tumbuhnya pemukiman-pemukiman padat yang tidak rapi dan terkesan kurang sehat/kumuh. Kondisi lingkungan dan fasilitas rumah tinggal penduduk dapat menjadi cermin kondisi sosial ekonomi yang bermukim di dalamnya. Penduduk yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, biasanya cenderung tinggal di lingkungan pemukiman yang relatif layak huni. Sementara untuk penduduk dengan strata ekonomi bawah umumnya tinggal di lingkungan yang terbatas.

Di dalam pasal 4 undang-undang nomor 4 tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk memenuhi informasi mengenai kondisi perumahan serta permukiman saat ini agar dapat diperoleh dampak dari pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang sudah dilaksanakan, serta sebagai rujukan dalam penyusunan rencana, program dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman ke depan, maka diperlukan data dan informasi mengenai kondisi perumahan dan permukiman di Jawa Timur setiap tahunnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini BPS Provinsi Jawa Timur, secara rutin setiap tahun berupaya menyajikan informasi/data tentang perumahan yang bersumber hasil dari kegiatan Susenas. Namun perlu dipahami bahwa sampel data Susenas didesain hingga sampai level kabupaten/kota. Sehingga hasilnya merupakan fenomena/kondisi secara makro yang ada di wilayah kabupaten/kota dan tidak dapat menggambarkan kondisi wilayah pada tingkat di bawahnya seperti



Kecamatan, Desa/Kelurahan apalagi sampai tingkat RW/RT. Karena untuk kepentingan kebutuhan data sampai pada wilayah terkecil diperlukan sampel yang lebih besar atau dilaksanakan secara sensus untuk memperoleh kondisi *by name by address*.

Publikasi Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data perumahan di Provinsi Jawa Timur terutama untuk tahun 2018. Namun dalam ulasan juga disajikan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan.

Adapun data yang disajikan di antaranya kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan serta data terkait perumahan dan pemukiman lainnya, yang bermanfaat untuk bahan evaluasi dan monitoring tingkat keberhasilan program di bidang perumahan bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan di bidang perumahan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajiannya disusun dalam tiga bab di antaranya berisi Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab II Metodologi, berisi sumber data, serta konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Bab III Ulasan Ringkas, berisi ulasan singkat mengenai kondisi perumahan. Pada bagian terakhir terdapat lampiran tabel-tabel yang berisi data/informasi terkait dalam pembahasan ini. Data yang dimunculkan dalam tabel lampiran sebagian besar menurut wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur terutama tahun 2018 dan tahun sebelumnya.

Adapun informasi tabel yang disajikan di antaranya tentang kondisi rumah tinggal menurut penguasaan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, luas lantai per kapita, serta atap dinding dan lantai terluas. Di samping itu juga dimuat data mengenai fasilitas yang dimiliki rumah tangga di antaranya kualitas air minum, sumber air minum, sumber air untuk MCK, jarak penampungan kotoran (tinja) terhadap

sumber air minum rumah tangga, fasilitas tempat buang air besar, bahan bakar dan sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga.

<https://jatim.bps.go.id>



BAB 2 METODOLOGI

2.1. Metodologi Susenas

Sumber data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Jawa Timur terutama tahun 2018. Desain sampel secara nasional, dengan representasi hasil merupakan gambaran umum fenomena/kondisi perumahan di Jawa Timur tahun 2018 hingga tingkat kabupaten/kota.

Rumah tangga yang dipilih dalam sampel Susenas 2018 adalah rumah tangga biasa, sedang rumah tangga dalam blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya serta rumah tangga khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di dalam blok sensus biasa tidak dipilih sebagai sampel. Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden.

Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk setiap individu dalam rumah tangga, pencacah berupaya agar semua keterangan berasal dari masing-masing individu tersebut. Namun jika tidak semua individu ART ada saat wawancara, maka informasi dari salah satu ART sebagai pemberi informasi, yang dapat menjelaskan atau mengetahui informasi tentang data dari seluruh ART lainnya. Bilamana diperlukan jika informasi tentang ART tersebut tidak diketahui oleh ART pemberi informasi, maka petugas pengumpul data Susenas berupaya mendapatkan informasi secara langsung. Keterangan yang bersifat umum dikumpulkan melalui kepala rumah tangga (KRT), pasangan KRT atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang terpilih sampel.

2.2. Konsep dan Definisi

Konsep definisi yang digunakan, antara lain:

- ❖ **Rumah tangga biasa**, adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur.

Rumah tangga biasa biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasanya antara lain:

- a. Seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam satu blok sensus yang sama.
- c. Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.

Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain:

- a. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-hari diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Anggota TNI dan POLRI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
- b. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan.
- c. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.
- d. ***Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam sampel Susenas.***



- ❖ **Kepala Rumah tangga khusus (KRT)** adalah seorang dari satu atau sekelompok anggota rumah tangga, yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
- ❖ **Anggota rumah tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. ART yang telah bepergian selama enam bulan atau lebih dan ART yang bepergian kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih atau yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut selama enam bulan atau lebih dianggap sebagai ART.

Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

- ❖ **Rumah**, adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman).
- ❖ **Status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal**, meliputi milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas dan lainnya.
- ❖ **Rumah Milik Sendiri**, adalah rumah yang pada saat pencacahan dimiliki oleh salah satu anggota rumah tangga (termasuk yang masih dalam masa kredit).
- ❖ **Rumah Kontrak**, adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dalam jangka tertentu, menurut perjanjian antara pemilik dan pemakai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- ❖ **Rumah Sewa**, adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

- ❖ **Rumah Bebas Sewa**, adalah rumah yang diperoleh dari pihak lain dan ditempati (didiami) oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- ❖ **Rumah Dinas**, adalah rumah yang dimiliki oleh suatu instansi tempat bekerja dari salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa maupun tidak.
- ❖ **Rumah milik orang tua/famili**, adalah rumah bukan milik sendiri, melainkan milik orang tua/famili dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
- ❖ **Lantai**, adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah, seperti: keramik, marmer, papan, dan semen.
- ❖ **Luas lantai**, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Sedangkan bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai.
- ❖ **Luas lantai per kapita** adalah rasio luas rumah/bangunan tempat tinggal dibagi jumlah penghuni per meter persegi.
- ❖ **Atap**, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung terutama dari terik matahari serta hujan.
- ❖ **Beton**, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
- ❖ **Genteng**, adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau fiber/*polycarbonate*.
- ❖ **Asbes**, adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
- ❖ **Lainnya**, meliputi kayu/sirap, seng, bambu, jerami, ijuk.
- ❖ **Dinding**, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan lain.

- ❖ **Tembok**, adalah dinding yang terbuat dari susunan batu merah atau batako, biasanya dilapisi plesteran semen.
- ❖ **Plesteran anyaman bambu/kawat**, adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 meter x 1 meter yang dibingkai dengan balok, diplester dengan campuran semen dan pasir.
- ❖ **Kayu**, adalah dinding yang terbuat dari bagian pohon yang tua.
- ❖ **Batang kayu**, adalah dinding yang terbuat dari batan pohon yang masih utuh/bulat.
- ❖ **Anyaman bambu**, adalah bambu yang diiris tipis-tipis, dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.
- ❖ **Lainnya**, meliputi seng, kardus, dan lain-lain.
- ❖ **Jamban/kloset**, adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kaskus.
- ❖ **Kloset leher angsa**, adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
- ❖ **Plengsengan**, adalah jamban/kaskus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
- ❖ **IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)/SPAL**, yaitu sebuah struktur yang dirancang secara terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain.
- ❖ **Got/selokan** adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan tinja/limbah/air hujan ke suatu tempat untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan.
- ❖ **Lubang tanah** adalah liang atau lekukan di dalam tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).
- ❖ **Sumber air minum**, antara lain: air dalam kemasan, air leding, air pompa, air sumur (perigi), dan mata air.

- ❖ **Air dalam kemasan**, adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan (gallon, botol atau gelas).
- ❖ **Air leding PAM/PDAM**, adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air.
- ❖ **Sumur bor/pompa** yaitu air tanah yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
- ❖ **Air sumur terlindung**, adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali serta dilindungi oleh tembok dan lantai semen.
- ❖ **Mata air terlindung**, adalah sumber air dari permukaan tanah yang timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
- ❖ **Air sumur/mata air tak terlindung**, adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali, atau air yang muncul dari permukaan tanah, tanpa ada perlindungan terhadap limbah.
- ❖ **Listrik PLN dengan meteran** yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik).
- ❖ **Listrik PLN tanpa meteran** yaitu sumber penerangan listrik yang bersumber langsung dari tiang listrik, tidak melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.
- ❖ **Listrik non PLN** yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu/aki, generator dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
- ❖ **Sumber penerangan bukan listrik** yaitu sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri dan lain-lain.
- ❖ **Kuintil** yaitu pengelompokan seluruh individu di suatu wilayah berdasarkan lima kelompok (dua puluh persen) yang sama jumlahnya, namun terlebih

dahulu diurutkan dari yang terendah kondisi ekonominya sampai yang tertinggi kondisi ekonominya. Sehingga berturut-turut akan diperoleh kuintil pertama adalah kelompok penduduk dua puluh persen pertama (terendah secara ekonomi), kuintil kedua adalah penduduk pada persentase ke dua puluh satu sampai dengan empat puluh persen dari populasi yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik, dan seterusnya sampai kuintil kelima adalah penduduk pada persentase 81 persen sampai persen ke seratus dari populasi yang memiliki tingkat ekonomi di atas kuintil pertama sampai keempat.

<https://jatim.bps.go.id>



BAB 3 ULASAN RINGKAS

3.1. Umum

Permasalahan hunian rumah/bangunan tempat tinggal merupakan kondisi yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Kondisi luas wilayah permukiman di daerah kabupaten/kota yang terbatas, tidak bisa mengimbangi pesatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk yang berakibat pada kepadatan penduduk antar wilayah kabupaten/kota tidak merata.

Berkaitan dengan hak bertempat tinggal sesuai amanat konstitusi pada bahasan sebelumnya, gambaran data/informasi berkaitan dengan rumah/bangunan tempat tinggal penduduk akan diulas pada bagian ini. Dimana akan diulas kondisi/situasi rumah tangga, terutama hasil kegiatan Susenas 2018, di antaranya adalah status kepemilikan rumah/bangunan, luas lantai per kapita dan rata-rata luas lantai perkapita, jenis atap, dinding terluas, fasilitas tempat BAB, jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja dan lain-lain.

3.2. Status Penguasaan Tempat Tinggal

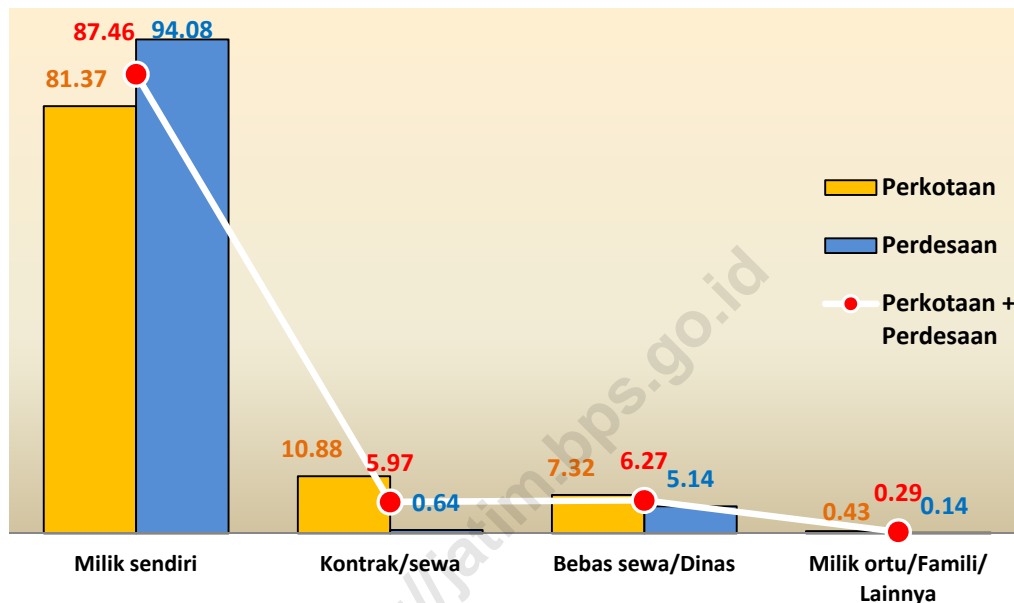
Perbedaan kondisi wilayah dimana rumah tangga berada dapat menyebabkan perbedaan pemenuhan rumah tangga akan kebutuhan rumah/bangunan. Seperti pada kepemilikan rumah/bangunan, rumah tangga dapat dibedakan berdasarkan rumah/bangunan yang dimiliki menjadi milik sendiri, kontrak/sewa, dan sebagainya. Tentu harapan dari setiap rumah tangga adalah terpenuhinya rumah atau bangunan berstatus milik sendiri untuk setiap kepala rumah tangga.

Secara umum status penguasaan rumah/bangunan tempat tinggal di Jawa Timur sebagian besar milik sendiri (87,46 persen). Jika ini dijadikan indikator *housing backlog*, maka masih ada lebih dari sepuluh persen rumah tangga di Jawa Timur 2017 yang tidak tinggal di rumah milik sendiri. Kepemilikan rumah milik sendiri menjadi masalah dominan, terutama bagi rumah tangga yang berada di perkotaan,

yang angkanya terpaut hampir lima belas persen lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan.

Masalah kepemilikan rumah dengan status milik sendiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi mereka yang berada di perkotaan, dimana hampir dua puluh persen

Gambar 1
Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal dan Wilayah di Jawa Timur, 2018



rumah tangganya belum memiliki rumah milik sendiri. Sedangkan di wilayah perdesaan rumah/bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri menjadi masalah bagi lima persen rumah tangga di perdesaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya rumah tangga di perkotaan yang belum memiliki rumah milik sendiri, terutama karena keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan densitas penduduk yang lebih tinggi, sehingga permintaan akan kebutuhan rumah tinggal di perkotaan tentu semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan tingginya harga rumah tinggal serta lahan untuk permukiman dibandingkan dengan di wilayah perdesaan.

Bila dilihat menurut daerah kabupaten/kota, masalah *housing backlog* terbesar terjadi berturut-turut (dari yang terendah persentase rumah tangga yang memiliki

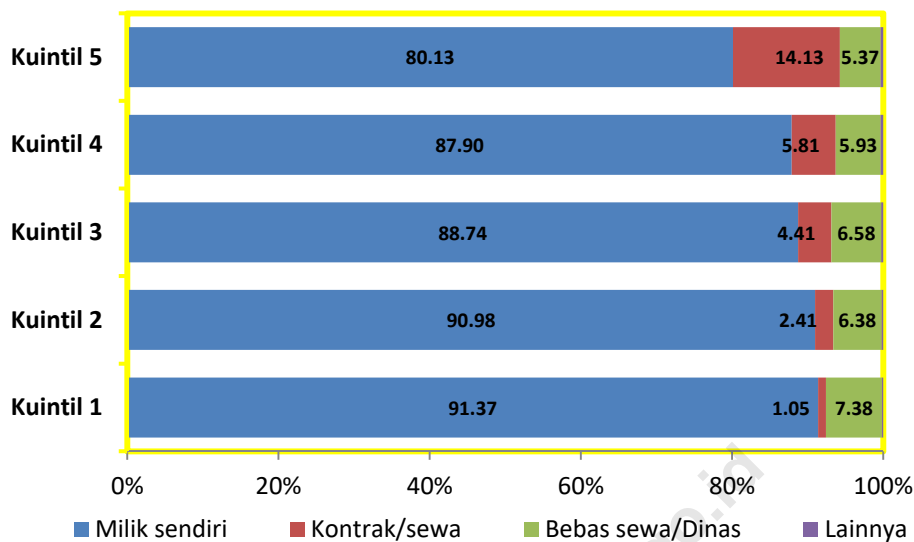
bangunan/rumah tinggal milik sendiri) yaitu pada tiga wilayah Kota, yaitu Surabaya (59,05 persen), Malang (65,83 persen), dan Madiun (66,56 persen). Cukup dimaklumi jika kondisi ini terjadi di wilayah-wilayah tersebut, terutama karena pesatnya perekonomian serta pusat kota pendidikan di Jawa Timur, yang meningkatkan permintaan lahan sebagai pendukung aktifitas ekonomi dan penunjang pendidikan. Sedangkan wilayah dengan pemenuhan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri terbesar di tiga wilayah Kabupaten, yaitu Sumenep (96,83 persen), Bangkalan (96,06 persen), dan Probolinggo (95,99 persen).

Pesatnya aktifitas perekonomian di Kota Surabaya juga terlihat dari besarnya rumah tangga yang bertempat tinggal pada rumah atau bangunan kontrak atau sewa. Dimana tiga dari sepuluh rumah tangga di Surabaya tinggal di rumah/bangunan tempat tinggal berupa sewa/kontrak. Kota Malang sebagai pusat pendidikan di Jawa Timur berada di urutan kedua, dimana satu dari empat rumah tangga di Kota Malang tinggal di kontrakan atau rumah sewa.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, persentase rumah tangga yang menempati rumah/bangunan tempat tinggal dengan status kepemilikan milik sendiri masih relatif tetap pada kisaran 87 persen, yaitu 87,55 persen pada tahun 2017 dan 87,46 persen pada tahun 2018.

Jika dilihat berdasarkan strata ekonomi rumah tangga di Jawa Timur tahun 2018, terlihat bahwa status penguasaan rumah/bangunan milik sendiri dominan di semua semua kuintil. Namun ada kecenderungan semakin meningkat strata ekonomi rumah tangga di Jawa Timur, maka persentase kepemilikan rumah milik sendiri justru semakin menurun di setiap kuintilnya. Hal sebaliknya untuk status penguasaan rumah atau bangunan kontrak atau sewa, semakin tinggi kuintil kesejahteraan rumah tangga, maka semakin besar pula rumah tangga dengan status penguasaan rumah atau bangunan tempat tinggal berupa sewa atau kontrak.

Gambar 2
Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan
Tempat Tinggal dan Tingkat Kesejahteraan di Jawa Timur, 2018



3.3. Kondisi Fisik Bangunan Rumah Tinggal

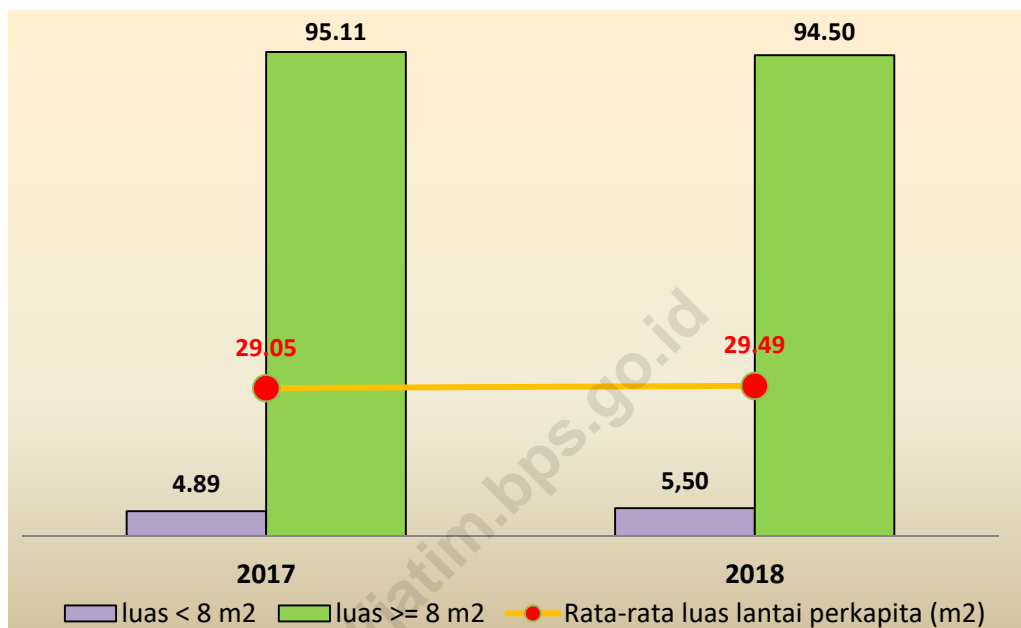
Kondisi fisik rumah/bangunan tempat tinggal merupakan hal yang berkorelasi dengan kualitas hidup para penghuninya. Karena kualitas fisik bangunan tempat tinggal dapat langsung mempengaruhi derajat kesehatan mereka yang berada di dalamnya. Semakin baik strata ekonomi rumah tangga memiliki kecenderungan, semakin baik pula kondisi fisik rumah tinggal rumah tangga. Namun demikian, faktor pengetahuan dan lingkungan juga turut memberi pengaruh akan kondisi ini. Pada bahasan selanjutnya, akan diulas mengenai kondisi fisik bangunan rumah tinggal dari rumah tangga di Jawa Timur, seperti: luas lantai, atap terluas, dinding serta kondisi fisik yang lain.

3.3.1. Luas Lantai

Luas lantai rumah/bangunan tempat tinggal umumnya berkaitan dengan status ekonomi rumah tangga serta dipengaruhi juga dimana permukiman tersebut berada. Hasil Susenas, dapat digunakan untuk melihat luasan lantai

rumah/bangunan tempat tinggal. Dimana berdasarkan kriteria kelayakan, luas lantai per kapita disebut layak huni, jika memiliki luas minimal 8 meter persegi per orang.

Gambar 3
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan yang Ditempati di Jawa Timur, 2017-2018



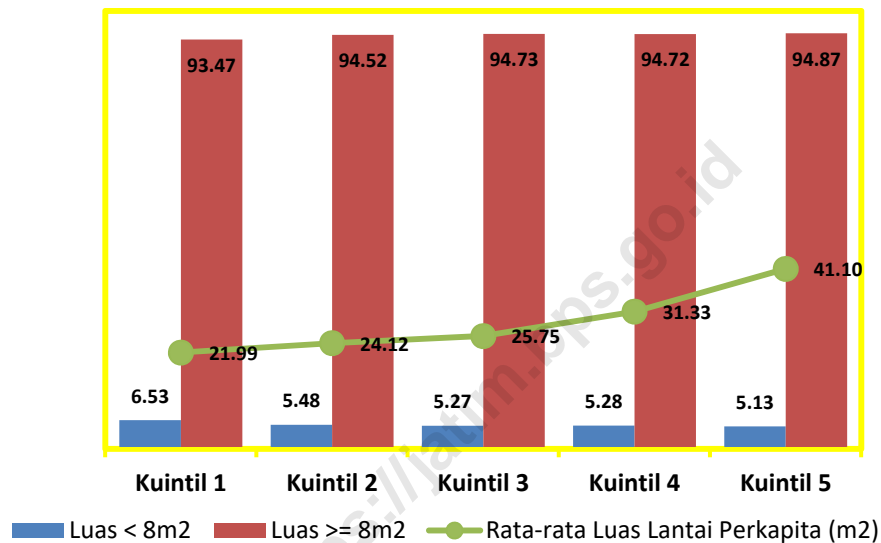
Pada tahun 2018 terdapat 94,50 persen rumah tangga di Jawa Timur memiliki rumah/bangunan dengan luas lantai minimal 8 meter persegi per kapita. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2017 (95,11 persen). Namun dugaan kondisi ini disebabkan karena semakin besarnya muatan anggota atau rumah tangga dalam satu rumah/bangunan tidak sepenuhnya didukung oleh data rata-rata luas lantai perkapita yang cenderung meningkat dari 29,05 meter persegi perkapita menjadi 29,49 meter persegi.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota maka rumah tangga yang menempati rumah/bangunan dengan luas lantai \geq 8 meter persegi per kapita memperlihatkan persentase terendah berada di Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan permasalahan

keterbatasan lahan yang ada di Kota Surabaya, sehingga harga per satuan meter persegi, relatif lebih mahal dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur.

Berdasarkan strata tingkat kesejahteraan di Jawa Timur tahun 2018, maka terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi kuintil rumah tangga maka kecenderungan luas lantai bangunan atau rumah tempat tinggal semakin luas.

Gambar 4
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita
Rumah/Bangunan yang Ditempati dan Tingkat Kesejahteraan di Jawa
Timur, 2018

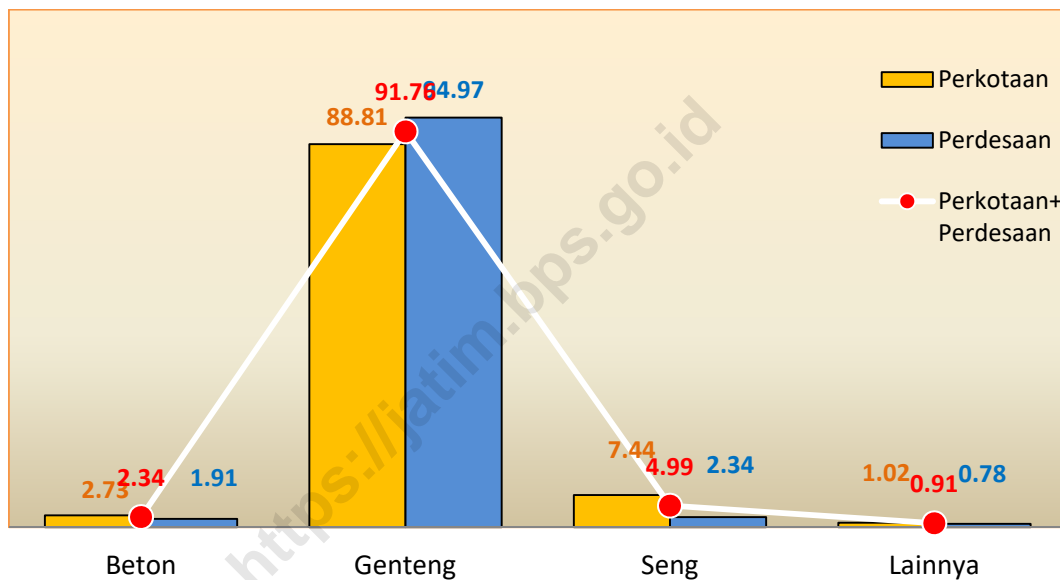


3.3.2. Kualitas Atap Rumah/Bangunan Terluas

Hasil Susenas 2018 memperlihatkan bahwa di Jawa Timur atap jenis genteng masih menjadi bahan atap terluas bagi sebagian besar rumah tangga, yaitu sebesar 91,76 persen kondisi ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 93,23 persen. Jenis atap terbesar selanjutnya masih sama dengan kondisi 2017, yaitu jenis atap asbes, dimana pada tahun 2018 sebanyak 4,99 rumah tangga menggunakan atap jenis asbes. Penggunaan atap terluas jenis asbes ini berada di kisaran yang sama dengan kondisi tahun 2017.

Jika dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, maka sekitar 88,81 persen rumah tangga di perkotaan menggunakan atap jenis genteng. Sedangkan penggunaan atap jenis genteng di wilayah perdesaan 94,97 persen. Sementara itu, jika dilihat menurut kabupaten/kota, maka penggunaan atap jenis genteng paling banyak di Kabupaten Ngawi, dimana 99,30 persen rumah tangga menggunakan atap jenis ini. Sedangkan wilayah terendah dalam penggunaan atap jenis genteng adalah Kota Surabaya, yaitu 65,24 persen.

Gambar 5
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Atap di Jawa Timur, 2018

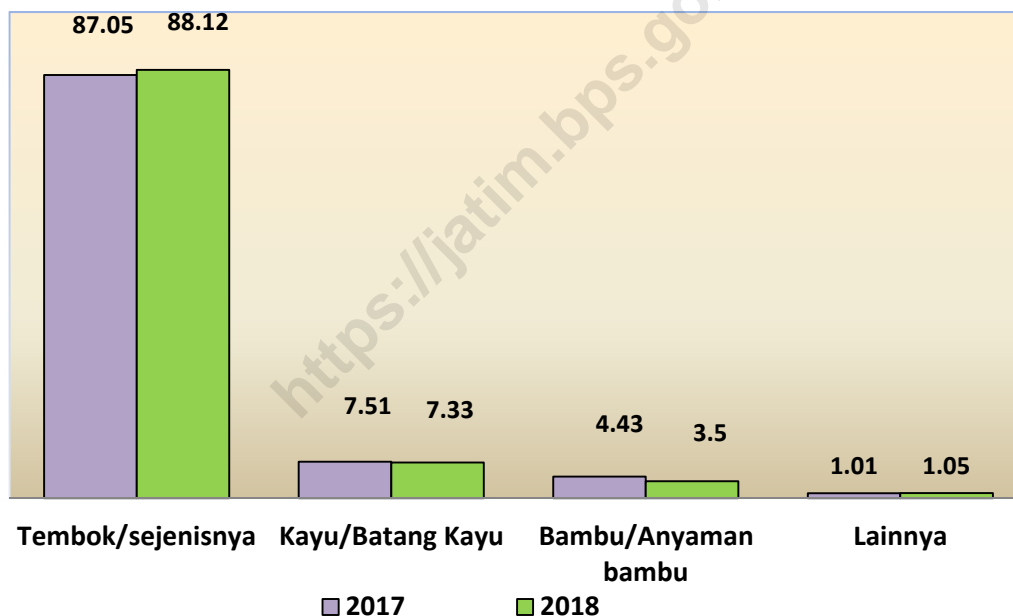


3.3.3. Kualitas Dinding Rumah/Bangunan Terluas

Berdasarkan data Susenas 2018, dinding bangunan rumah tinggal di Jawa Timur pada umumnya terbuat dari tembok. Terjadi peningkatan lebih dari satu persen penggunaan dinding tembok pada rumah tangga di Jawa Timur, dari 87,05 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 88,12 persen pada tahun 2018. Secara umum terjadi penurunan persentase untuk semua jenis dinding selain tembok, seperti kayu dan bambu/anyaman bambu.

Masih seperti tahun sebelumnya, penggunaan jenis dinding tembok terendah menurut kabupaten/kota terendah di Kabupaten Bojonegoro, dimana kurang dari setengah rumah tangga menggunakan dinding berjenis tembok. Dimana masyarakat Kabupaten Bojonegoro masih banyak yang menggunakan jenis dinding kayu atau batang kayu. Sementara itu dinding berjenis bambu atau anyaman bambu masih cukup banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Bondowoso, dimana rata-rata dari sepuluh rumah tangga akan ditemukan satu rumah tangga tinggal pada bangunan dengan jenis dinding berupa bambu atau anyaman bambu. Namun demikian penggunaan jenis dinding ini mengalami penurunan.

Gambar 6
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Rumah Tinggal di Jawa Timur, 2017-2018

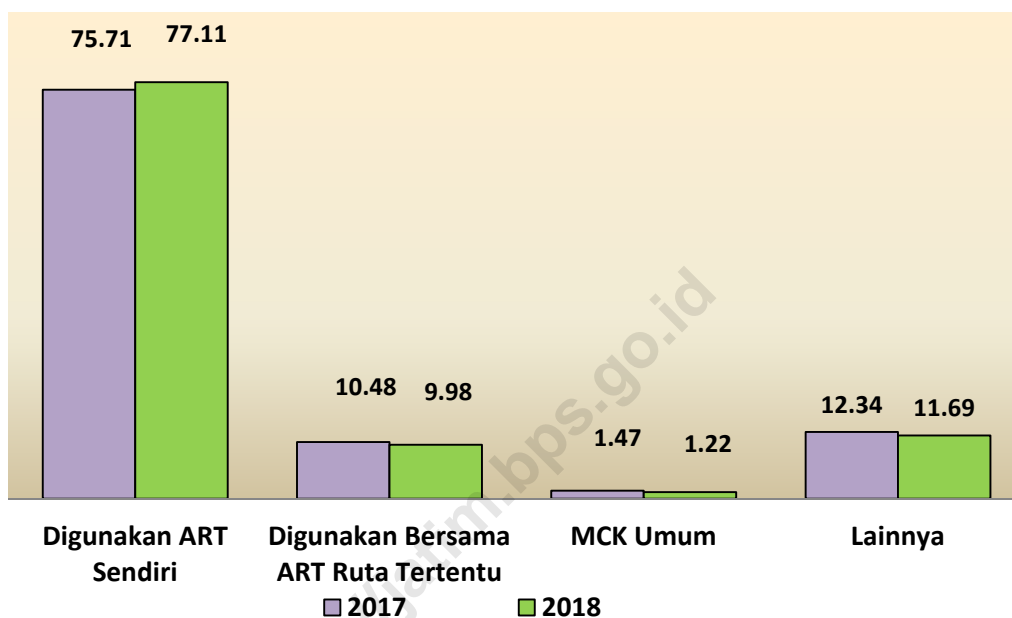


3.3.4. Kualitas Fasilitas BAB yang Digunakan

Fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) merupakan salah satu fasilitas penting yang harus dimiliki rumah/bangunan tempat tinggal, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh penghuni rumah/bangunan tempat tinggal rumah tangga.

Biasanya dibuat menjadi satu di dalam kamar mandi. Fasilitas ini merupakan salah satu yang memiliki kontribusi pada upaya peningkatan kesehatan di masyarakat, terutama pada akses sanitasi yang baik.

Gambar 7
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas BAB
di Jawa Timur, 2017-2018



Berdasarkan hasil Susenas menunjukkan bahwa rumah/bangunan tempat tinggal yang rumah tangganya memiliki sendiri fasilitas BAB meningkat dari 75,71 persen di tahun 2017 menjadi 77,71 persen pada tahun 2018. Namun demikian hal yang masih perlu menjadi catatan adalah kondisi dimana dua dari sepuluh rumah tangga di Jawa Timur masih belum memiliki akses tersendiri ke fasilitas BAB di Jawa Timur. Mengingat besarnya manfaat dari kepemilikan sendiri fasilitas BAB oleh rumah tangga ini dapat menekan angka kesakitan terutama untuk penyakit yang ditularkan lewat BAB.

Bila dilihat menurut sebaran wilayah kabupaten/kota, permasalahan akses fasilitas BAB ini menjadi permasalahan di empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Bondowoso, Situbondo, Kabupaten Probolinggo dan Jember. Karena rata-rata

terdapat tiga atau empat dari sepuluh rumah tangga di wilayah ini anggota rumah tangganya tidak mengakses MCK atau tidak ada fasilitas BAB. Hal ini akan meningkatkan risiko pada aspek kualitas kesehatan masyarakat pada empat wilayah ini.

3.3.5. Jenis Kloset yang Digunakan

Penggunaan kloset rumah tangga yang baik juga turut menjadi indikator yang berperan dalam peluang menekan angka kesakitan, terutama dengan pemanfaatan jenis kloset yang dapat mengurangi penularan jenis penyakit yang ditularkan melalui medium feces.

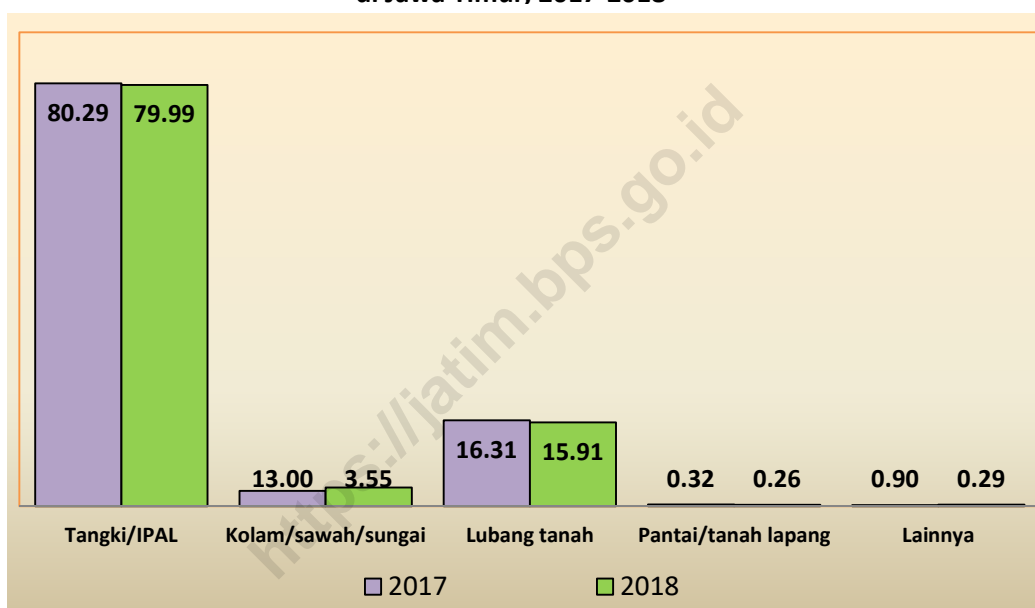
Berdasarkan hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa sembilan dari 10 rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB menggunakan kloset jenis leher angsa (91,51 persen). Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dimana rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB dengan kloset leher angsa sebesar 90,37 persen pada tahun 2017. Namun demikian penggunaan kloset leher angsa antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar gap keduanya, dimana di wilayah perkotaan sudah 96,74 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri atau bersama menggunakan kloset jenis leher angsa, sedangkan di wilayah perdesaan baru 85,14 persen di tahun 2018.

Sementara itu, di Jawa Timur pada tahun 2018 masih ada 6,58 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri atau milik bersama menggunakan kloset jenis cemplung atau cubluk, meskipun persentasenya menurun dibanding tahun 2017 yaitu 7,89 persen. Kloset jenis ini sangat rentan terjadinya kontak antara pengguna yang sehat dengan pengguna yang sakit yang ditularkan melalui medium feces.

Berdasarkan sebaran wilayah, penggunaan kloset jenis leher angsa oleh hampir seluruh rumah tangga yaitu di Kota Blitar, Mojokerto, Pasuruan, Kediri serta Kabupaten Lamongan yang persentasenya mencapai 99 persen. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bangkalan dan Pacitan merupakan wilayah dengan rumah

tangga yang masih menggunakan kloset jenis cemplung/cubluk yang cukup tinggi yaitu rata-rata dari sepuluh rumah tangga terdapat dua atau tiga rumah tangga dengan akses fasilitas BAB sendiri atau bersama dengan jenis kloset cemplung atau cubluk. Meskipun demikian, untuk Kabupaten Bangkalan penggunaan kloset cemplung atau cubluk bila tahun 2017 digunakan oleh lebih dari separuh rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri atau bersama, maka di tahun 2018 sudah berkurang menjadi 34,18 persen.

Gambar 8
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
di Jawa Timur, 2017-2018



3.3.6. Kualitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Salah satu faktor penting dalam upaya pencapaian kesehatan masyarakat diantaranya adalah kebersihan lingkungan di area hunian permukiman. Keterbatasan lahan permukiman dengan penataan yang tidak teratur berpotensi menjadikan permukiman kumuh, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan di area tersebut. Salah satu penunjang kebersihan lingkungan adalah kondisi fasilitas tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga.

Berdasarkan data Susenas 2018, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri atau bersama menurut tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan tangki/IPAL cukup dominan dengan persentase 79,99 persen. Namun demikian masih ada pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan tangki/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, karena masih sekitar dua puluh persen rumah tangga di Jawa Timur yang tempat pembuangan akhir tinja bukan pada tempat yang semestinya, seperti di kolam/sawah/sungai, lubang tanah, pantai/tanah lapang dan lainnya. Masyarakat yang berada pada wilayah dengan kondisi seperti ini akan rentan terinfeksi penyakit yang disebabkan oleh media feces dan berpeluang menjadi wabah penyakit.

Bila dilihat menurut wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Bangkalan serta Pacitan merupakan wilayah yang mesti menjadi prioritas dalam meningkatkan penggunaan Tangki/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Karena pada wilayah-wilayah tersebut, separuh atau lebih rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas BAB menjadikan lubang tanah, kolam/sawah/sungai, pantai/tanah lapang/lainnya sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

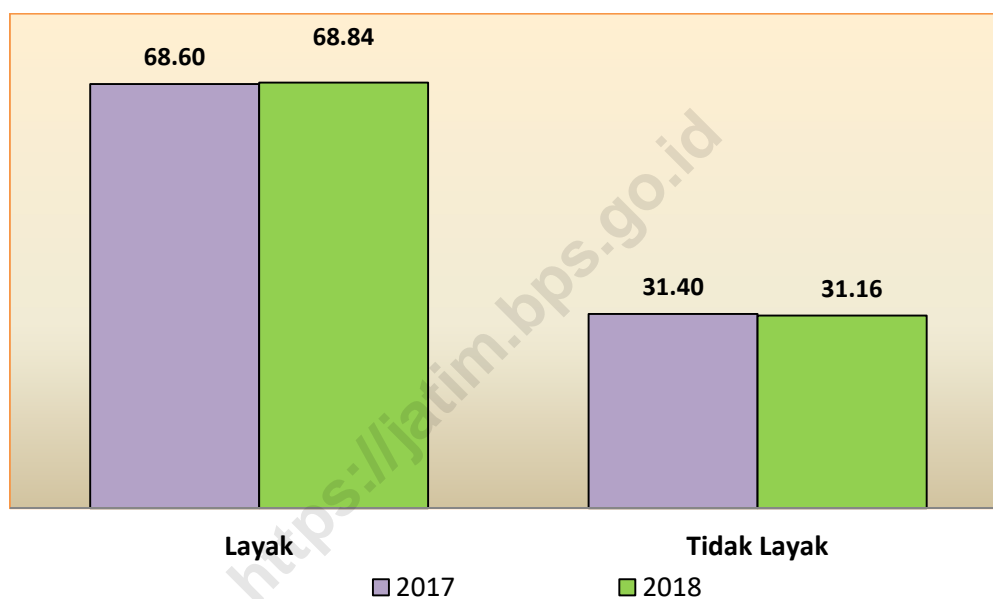
3.3.7. Kualitas Sanitasi yang Digunakan Rumah Tangga

Tantangan global dari permasalahan permukiman adalah pemenuhan sanitasi serta sumber air minum yang layak menjadi prioritas bersama. Untuk ini maka diperlukan upaya yang terencana serta berkelanjutan.

Untuk pemenuhan sanitasi layak, hasil Susenas 2018 menunjukkan persentase rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 68,84 persen, sedikit lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2017 yaitu 68,80 persen. Dengan kata lain, rata-rata setidaknya ada tiga rumah tangga dari sepuluh rumah tangga di Jawa Timur masih belum dapat mengakses sarana sanitasi yang layak.

Permasalahan akses sanitasi layak oleh rumah tangga ini terutama terjadi di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, Probolinggo, Bangkalan, dan Situbondo, dikarenakan lebih dari separuh rumah tangga di wilayah ini belum mengakses sanitasi yang layak. Sebaliknya Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Blitar merupakan tiga wilayah dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan sanitasi yang layak.

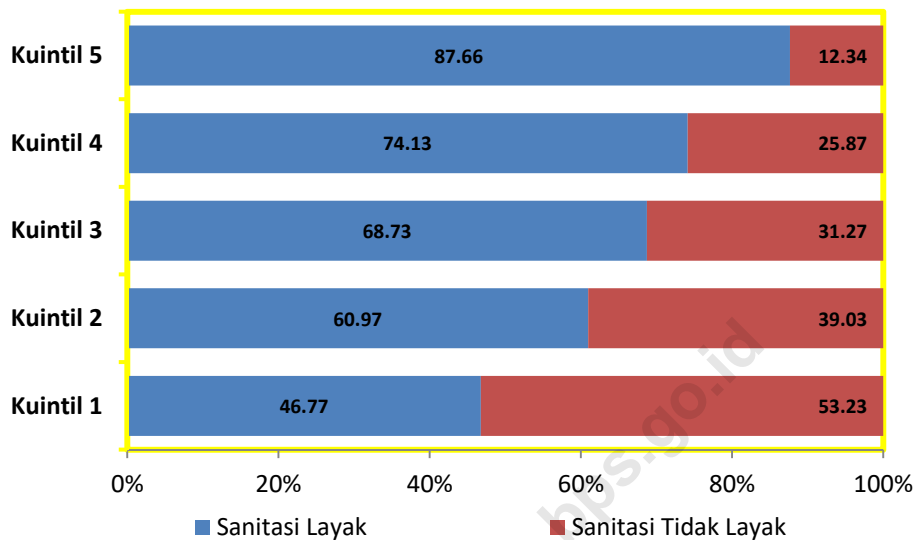
Gambar 9
Persentase Rumah Tangga menurut Kelayakan Sarana Sanitasi
di Jawa Timur, 2017 – 2018



Sementara itu, berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Jawa Timur 2018 dapat diperoleh gambaran bahwa semakin meningkat kuintil kesejahteraan rumah tangga, maka semakin besar pula kepedulian akan akses pada sanitasi layak. Terlihat bahwa sanitasi layak menjadi permasalahan pada dua puluh persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Jawa Timur. Karena kurang dari separuh rumah tangga yang berada pada kuintil terendah pertama dapat mengakses sanitasi yang layak. Kondisi ini menyebabkan pada kelompok ini memiliki kualitas sangat rentan terhadap kualitas kesehatan. Sebaliknya pada

kuintil kelima terlihat bahwa delapan dari sepuluh rumah tangga yang masuk dalam strata ekonomi ini telah mengakses sanitasi layak.

Gambar 10
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Sanitasi Layak dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Jawa Timur, 2018



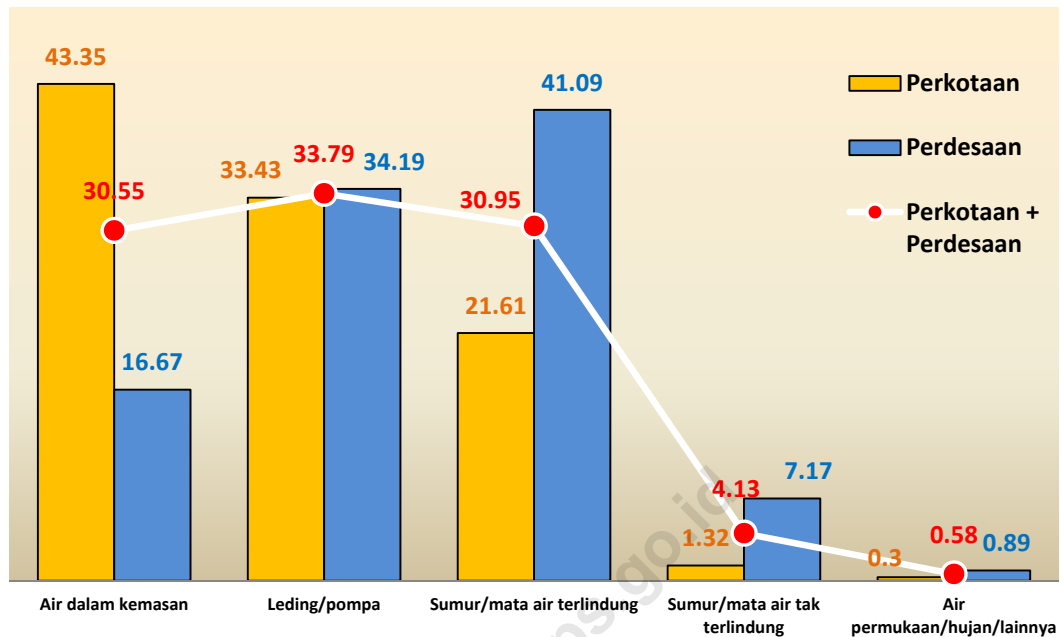
3.4. Kualitas Sumber Air Rumah Tangga

Ketersediaan sumber air minum merupakan salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi pemenuhannya oleh rumah tangga. Untuk itu, tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga kualitas harus terjaga, terutama dari sisi kebersihan dan kesehatan.

3.4.1. Kualitas Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga

Sumber air minum sebagian besar rumah tangga di Jawa Timur tahun 2018 berasal dari sumur/mata air terlindung, leding/pompa, dan air dalam kemasan air dalam kemasan, yang mencapai 95,29 persen meningkat dari kondisi 2017 yaitu 94,96 persen. Namun sebagai catatan bahwa sumber air minum tersebut masih belum dikatakan baik, karena masih perlu dikoreksi dengan aspek kontinuitas dari sisi ketersediaan dan jarak yang aman dari sumber pencemar.

Gambar 11
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang Digunakan dan Wilayah di Jawa Timur, 2018



Jika dilihat keterbandingan antara wilayah perkotaan dan perdesaan tahun 2018 memperlihatkan terdapat pola yang berbeda. Dimana penduduk perkotaan lebih dominan mengkonsumsi air minum yang berasal dari air dalam kemasan yaitu sebesar 43,35 persen. Sedangkan penduduk di perdesaan lebih dominan mengkonsumsi air minum yang bersumber dari sumur/mata air terlindung yang persentasenya mencapai 41,09 persen.

Tantangan pemenuhan sumber air minum masih menjadi pekerjaan rumah terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan. Dimana masih ada 8,06 persen rumah tangga di perdesaan yang sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung serta air permukaan/hujan/lainnya, dimana pada wilayah perkotaan rumah tangga dengan akses sumber air minum tersebut hanya 1,62 persen.

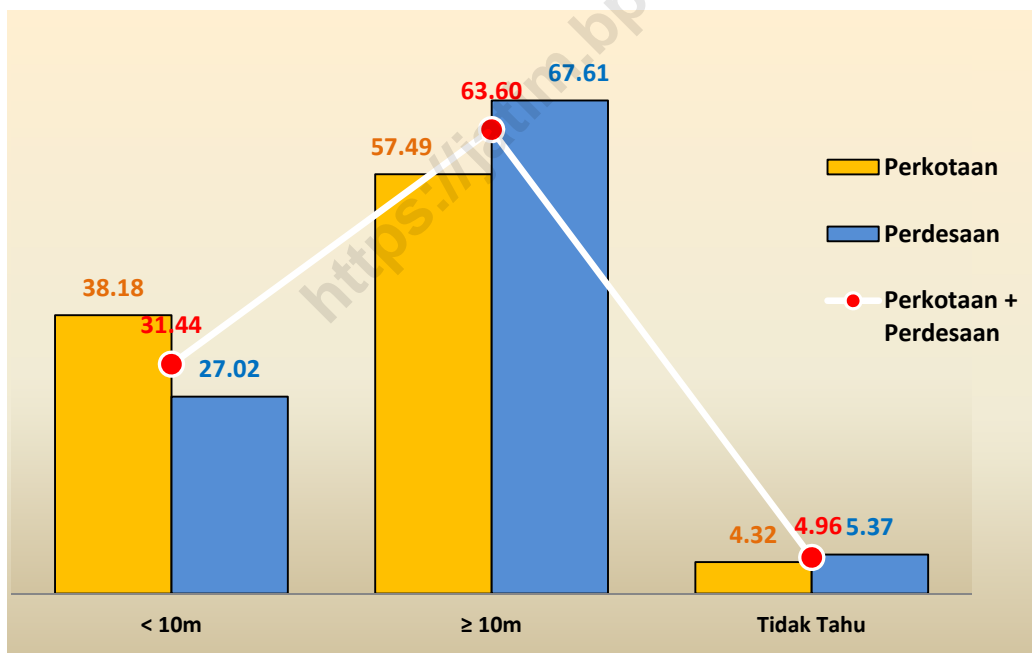
Tantangan tersebut terutama berada di wilayah Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Sampang, dan Pamekasan, dimana pada keempat wilayah tersebut rata-rata satu dari sepuluh rumah tangganya bergantung pada sumber air minum berasal dari

sumur/mata air tak terlindung serta air permukaan/hujan/lainnya. Sementara itu tantangan sumber air minum dari sisi ketersediaan yang berkelanjutan di masa mendatang terutama untuk rumah tangga di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, dimana lebih dari 80 persen rumah tangganya memiliki air minum bersumber dari air dalam kemasan.

3.4.2. Jarak Sumber Air Minum yang Digunakan Rumah Tangga ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat

Khusus rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berasal dari sumur serta mata air, perlu dilihat jarak terdekat ke tempat penampungan limbah terdekat. Jarak yang direkomendasikan aman bagi terjadinya rembesan limbah atau kotoran ke sumber air minum adalah minimal 10 meter.

Gambar 12
Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air ke Tempat Pembuangan Limbah Terdekat di Jawa Timur, 2018



Berdasarkan Susenas 2018, rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur atau mata air baik terlindung maupun tidak terlindung sebagian besar

memiliki jarak minimal 10 meter dengan tempat penampungan limbah terdekat, yaitu sebesar 63,60 persen. Sedangkan yang berjarak kurang dari 10 meter sebesar 31,44 persen. Permasalahan jarak minimal dengan tempat penampungan limbah terdekat ini menjadi tantangan terutama bagi pemukiman di wilayah perkotaan. Keterbatasan lahan di perkotaan dengan keterbandingan penduduk, menyebabkan luasan area rumah di wilayah ini menjadi terbatas, sehingga jarak antar rumah menjadi berdekatan atau berhimpitan. Hal ini menyebabkan sulitnya area rumah di pemukiman padat penduduk di perkotaan dapat terpenuhi dari sisi kelayakannya. Sehingga penyediaan sumber air minum yang berasal dari pipanisasi menjadi solusi, terutama di wilayah perkotaan.

Wilayah Kota Kediri merupakan wilayah terbesar untuk rumah tangga dengan air minum bersumber dari sumur atau mata air yang berjarak kurang dari sepuluh meter, karena pada wilayah ini sebagian besar rumah tangganya berada pada kondisi tersebut.

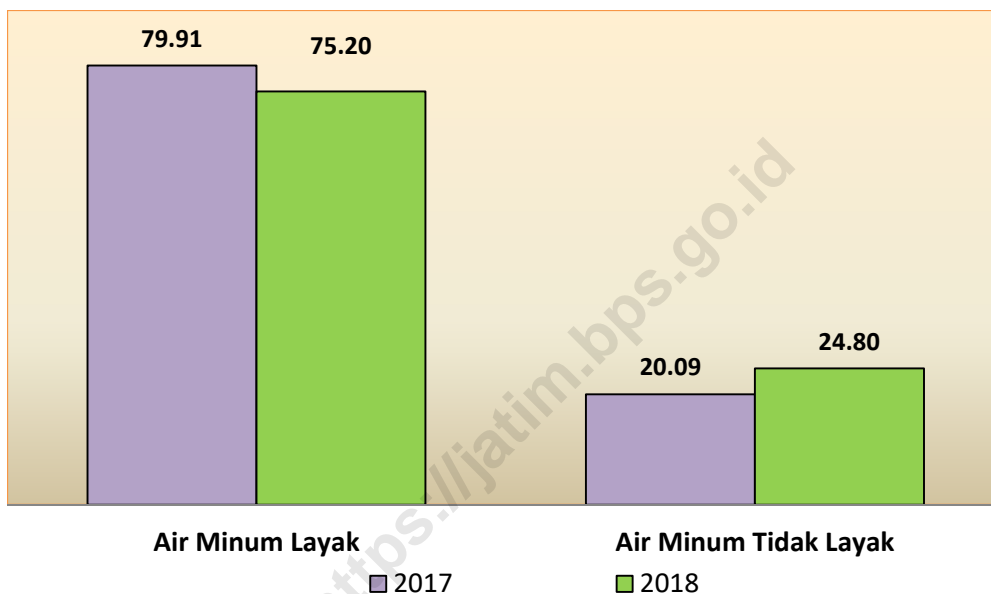
3.4.3. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak jika air minumannya bersumber dari air leding dan air hujan, serta sumur bor/pompa/sumur terlindung dan mata air terlindung dengan syarat memiliki jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat 10 meter atau lebih. Jika rumah tangga menggunakan air minum bersumber air kemasan/air isi ulang namun sumber air untuk cuci/masak/mandi menggunakan sumur bor/pompa/sumur/mata air yang terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat 10 meter atau lebih.

Tantangan utama di Jawa Timur adalah upaya pemenuhan air minum layak yang berkelanjutan, dimana berdasarkan hasil Susenas tahun 2018 diperoleh penurunan persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak di Jawa Timur. Dimana akses air minum layak berkelanjutan di Jawa Timur baru bisa diakses rata-rata tiga dari empat rumah tangga di Jawa Timur tahun 2018.

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, permasalahan akses air minum layak berkelanjutan menjadi tantangan utama bagi tiga wilayah utama ini yaitu Kabupaten Trenggalek, Jember, dan Bangkalan, merupakan tiga wilayah terbesar untuk akses air minum rumah tangga yang tidak layak. Sedangkan wilayah Kota Surabaya, Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo merupakan tiga terbesar wilayah dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak berkelanjutan.

Gambar 13
Persentase Rumah Tangga menurut Akses Air Minum Layak
di Jawa Timur, 2017 – 2018



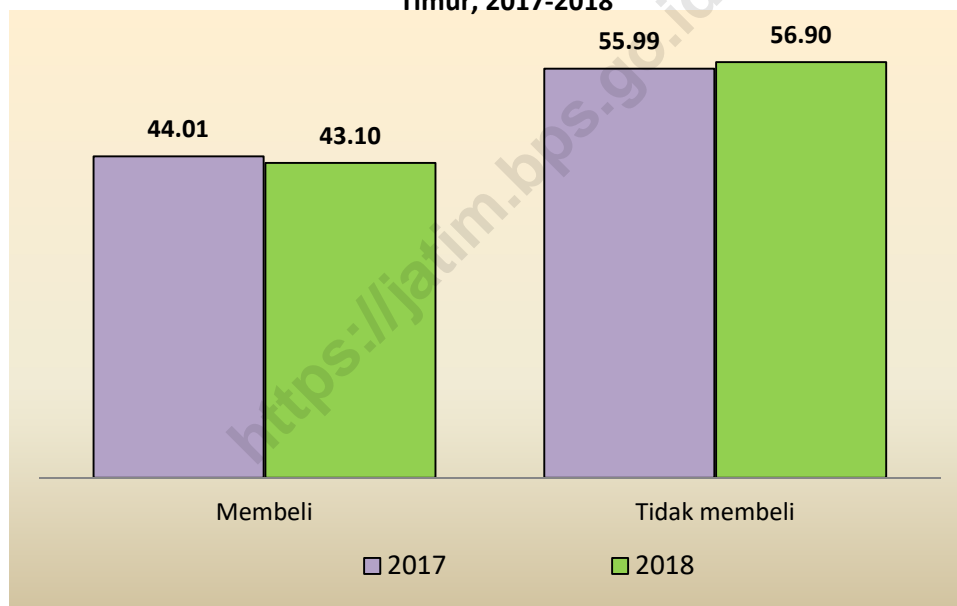
3.4.4. Cara Memperoleh Air Minum

Upaya pemenuhan air minum pada rumah tangga di Jawa Timur, sebagian besar tidak membebani rumah tangga dari sisi ekonomi. Hal ini dikarenakan lebih dari separuh rumah tangga di Jawa Timur tahun 2018 tidak perlu membeli untuk mendapatkan sumber air minum yang diperlukan sehari-hari (56,90 persen rumah tangga tidak membeli). Namun bila dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, maka kondisi ini cenderung berlaku pada rumah tangga di perdesaan (68,87 persen). Sedangkan pada rumah tangga di perkotaan sebagian besar rumah

tangganya harus membeli untuk mendapatkan sumber air minum yang diperlukan sehari-hari, yaitu 54,13 persen rumah tangga membeli sumber air minum.

Bila dilihat sebaran kabupaten/kota dalam pemenuhan sumber air minum sehari-hari yang tidak membayar berturut-turut dari yang terbesar adalah Kabupaten Kediri, Lumajang, Trenggalek, Situbondo, Jember, Blitar, dan Pamekasan. Dimana pada wilayah-wilayah tersebut lebih dari delapan puluh persen rumah tangganya tidak perlu membeli air minum. Sedangkan Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo, merupakan tiga besar wilayah yang rumah tangganya mesti membeli untuk mendapatkan air bersih.

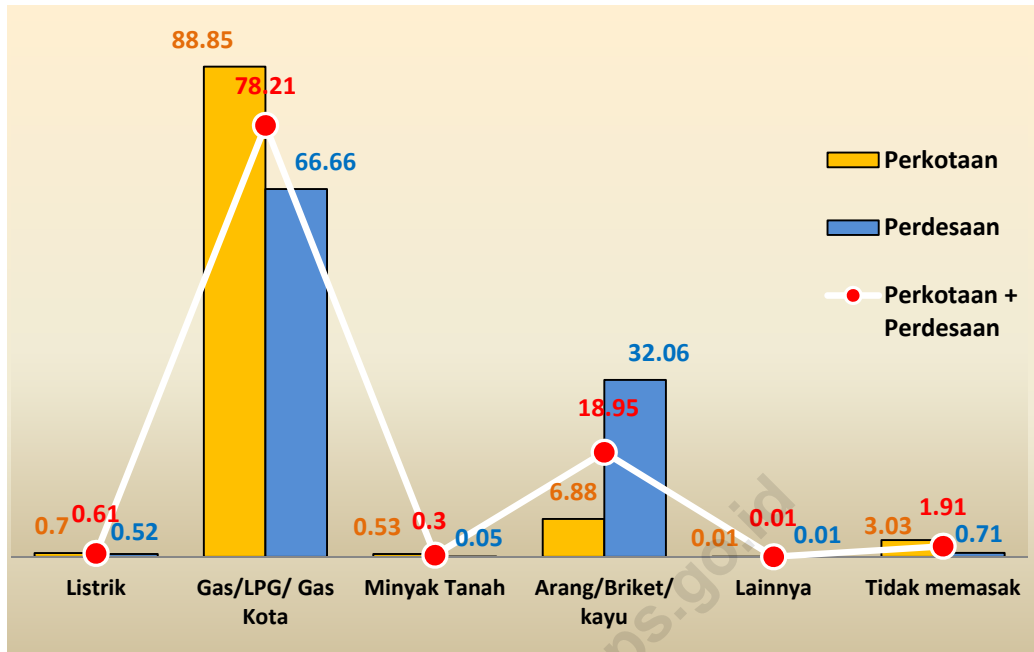
Gambar 14
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum di Jawa Timur, 2017-2018



3.5. Penggunaan Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Hal lain yang perlu dilihat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah penggunaan bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan diharapkan menjadi budaya bagi masyarakat.

Gambar 15
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan Memasak dan Wilayah di Jawa Timur, 2018



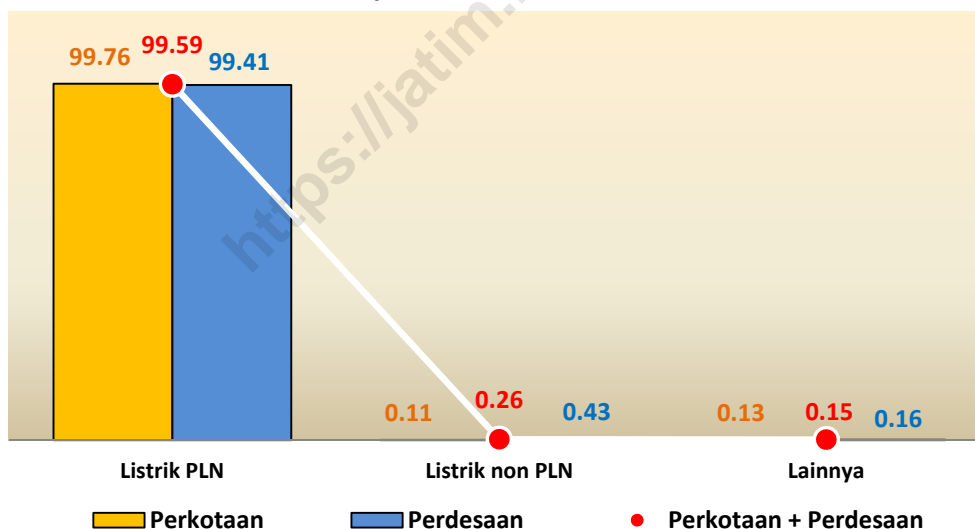
Berdasarkan hasil Susenas 2018, sebagian besar rumah tangga di Jawa Timur menggunakan bahan bakar jenis gas/LPG/gas kota yaitu sebesar 78,21 persen meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu 76,59 persen. Pemanfaatan bahan bakar jenis gas/LPG/gas kota ini sebagian besar pada wilayah perkotaan dimana 88,85 persen rumah tangga menggunakannya, terpaut 22,19 persen dengan rumah tangga pengguna bahan bakar gas/LPG/gas kota di perdesaan yaitu 66,66 persen. Namun demikian masih ada 18,95 persen rumah tangga di Jawa Timur yang memanfaatkan bahan bakar berjenis arang/briket/kayu. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah perdesaan, dimana tiga dari sepuluh rumah tangganya menggunakan bahan bakar arang/briket/kayu untuk memasak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama dampak negatif terhadap pencemaran serta kerusakan lingkungan jika tidak terkendali dalam penggunaannya, terutama untuk jenis kayu sebagai bahan bakar.

Pemanfaatan arang/briket/kayu sebagai bahan bakar untuk memasak oleh rumah tangga dipilih oleh lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Pacitan (65,09 persen) dan di wilayah ini pula penggunaan bahan bakar yang ideal untuk memasak yaitu bahan bakar jenis gas persentasenya terendah di Jawa Timur tahun 2018 (32,79 persen).

3.6. Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital, bahkan elektrifikasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Mengingat akses pada sumber penerangan yang kontinu berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan kualitas hidup penduduk, karena sumber penerangan tidak hanya memiliki fungsi pencahayaan saja, namun memiliki kontribusi perekonomian bagi rumah tangga.

Gambar 16
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama dan Wilayah di Jawa Timur, 2018

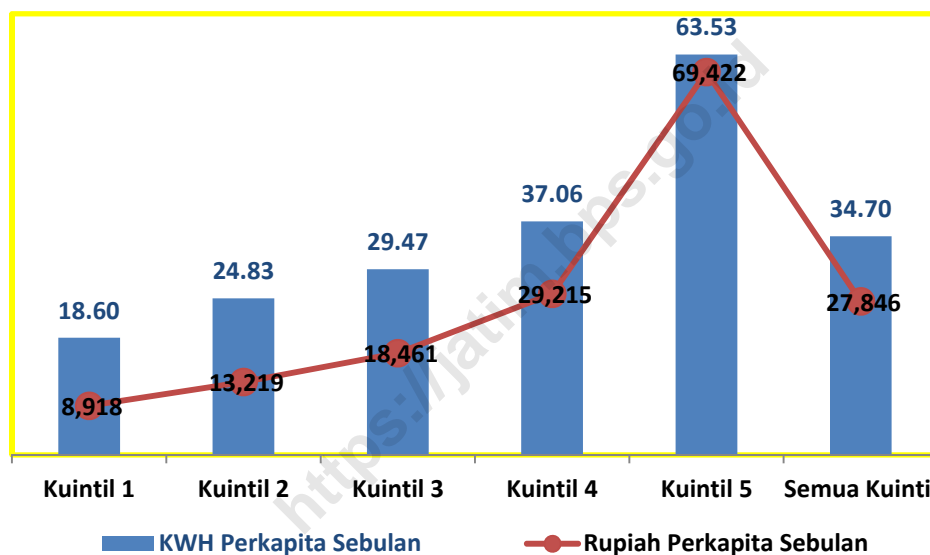


Dari hasil Susenas tahun 2018, hampir seluruh rumah tangga di Jawa Timur sudah menikmati listrik yang bersumber dari listrik PLN, yaitu 99,59 persen. Secara umum antara wilayah perkotaan dan perdesaan tidak menunjukkan perbedaan kondisi,

dimana rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN berada pada kisaran yang sama yaitu 99 persen.

Bila dilihat menurut kabupaten/kota maka sebagian besar wilayah sudah hampir seluruh rumah tangganya mendapatkan akses penerangan yang bersumber listrik PLN (berada pada kisaran 99 persen atau lebih). Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep dan Probolinggo terdapat lebih dari satu persen rumah tangganya belum mendapatkan akses penerangan utama bersumber dari listrik PLN.

Gambar 17
Rumah Tangga menurut Rata-rata Konsumsi Listrik KWH dan Rupiah
Perkapita Sebulan serta Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Jawa
Timur, 2018



Untuk konsumsi listrik menurut rumah tangga di Jawa Timur tahun 2018, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan adalah 27.646 rupiah per kapita sebulan. Sedangkan untuk KWH yang dikonsumsi dalam sebulan di Jawa Timur rata-rata 34,70 KWH perkapita sebulan. Terlihat bahwa konsumsi KWH listrik dominan pada kuintil kelima, dimana rata-rata KWH perkapita yang dikonsumsi selama sebulan tiga kali yang dikonsumsi oleh kuintil pertama. Hal yang sama untuk nilai rupiah yang dikeluarkan.



Lampiran Tabel

<https://jurnal.bps.go.id/>

Tabel 1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Milik sendiri		Kontrak/sewa		Bebas sewa/Dinas		Milik ortu/Famili/Lainnya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	96,21	94,58	0,75	1,25	2,71	2,90	0,33	1,27
2 Kab. Ponorogo	92,77	94,43	1,56	0,81	5,67	4,75	0,00	0,00
3 Kab. Trenggalek	94,80	95,40	0,40	0,59	4,35	3,57	0,45	0,45
4 Kab. Tulungagung	91,56	93,93	1,33	1,63	6,88	4,34	0,23	0,11
5 Kab. Blitar	93,75	93,93	1,20	0,73	4,95	5,15	0,11	0,18
6 Kab. Kediri	89,72	93,32	2,69	1,18	7,49	5,43	0,09	0,07
7 Kab. Malang	92,20	90,98	3,29	2,95	4,34	6,07	0,17	0,00
8 Kab. Lumajang	94,32	93,98	1,20	3,39	4,49	1,66	0,00	0,97
9 Kab. Jember	92,10	89,63	3,38	1,59	4,52	8,55	0,00	0,24
10 Kab. Banyuwangi	86,96	87,01	3,06	2,63	9,55	10,18	0,43	0,18
11 Kab. Bondowoso	91,89	92,29	1,52	1,05	6,59	6,24	0,00	0,43
12 Kab. Situbondo	91,23	89,10	1,48	2,51	7,15	8,35	0,14	0,04
13 Kab. Probolinggo	95,15	95,99	0,67	0,47	3,83	3,32	0,35	0,22
14 Kab. Pasuruan	93,45	89,67	1,40	4,39	4,75	5,74	0,40	0,21
15 Kab. Sidoarjo	79,17	79,52	16,21	15,92	4,63	4,29	0,00	0,27
16 Kab. Mojokerto	89,51	94,08	5,81	3,53	4,68	2,24	0,00	0,16
17 Kab. Jombang	88,04	85,21	2,49	3,87	9,24	10,70	0,23	0,22
18 Kab. Nganjuk	89,48	87,52	1,72	2,07	8,49	10,27	0,31	0,14
19 Kab. Madiun	93,99	86,73	0,93	1,18	4,89	12,10	0,19	0,00
20 Kab. Magetan	90,63	94,48	1,71	1,15	7,65	4,22	0,00	0,15
21 Kab. Ngawi	89,46	92,10	0,59	0,67	9,52	6,81	0,43	0,41
22 Kab. Bojonegoro	96,08	94,90	1,42	0,74	2,50	4,09	0,00	0,27
23 Kab. Tuban	96,08	92,18	1,39	2,05	2,53	5,24	0,00	0,53
24 Kab. Lamongan	92,94	92,32	1,20	1,44	5,86	5,65	0,00	0,59
25 Kab. Gresik	86,08	83,42	11,10	11,60	2,82	4,98	0,00	0,00
26 Kab. Bangkalan	96,00	96,06	0,80	1,59	2,71	2,35	0,49	0,00
27 Kab. Sampang	92,37	94,87	1,10	0,88	6,53	4,25	0,00	0,00
28 Kab. Pamekasan	90,18	89,87	0,77	1,00	9,05	8,92	0,00	0,21
29 Kab. Sumenep	93,90	96,83	0,90	0,96	5,20	2,21	0,00	0,00
71 Kota Kediri	72,72	72,63	10,71	12,44	15,57	14,94	1,00	0,00
72 Kota Blitar	78,04	72,90	8,50	13,05	13,28	13,85	0,18	0,20
73 Kota Malang	63,89	65,83	24,07	25,59	12,04	7,72	0,00	0,86
74 Kota Probolinggo	87,69	90,35	6,37	5,81	5,94	3,22	0,00	0,62
75 Kota Pasuruan	78,15	76,54	9,21	11,08	12,45	12,39	0,19	0,00
76 Kota Mojokerto	78,40	67,95	12,95	12,25	8,66	19,46	0,00	0,35
77 Kota Madiun	58,49	66,56	16,95	16,24	24,11	17,20	0,44	0,00
78 Kota Surabaya	56,81	59,05	30,06	31,93	12,77	8,09	0,35	0,93
79 Kota Batu	88,83	84,36	6,43	10,14	4,74	5,50	0,00	0,00
Jawa Timur	87,55	87,46	5,81	5,97	6,47	6,27	0,16	0,29

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai per Kapita Rumah/Bangunan Tempat Tinggal per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Luas lantai < 8 m2 per kapita		Luas lantai >= 8 m2 per kapita		Rata-rata luas lantai perkapita	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	1,35	2,22	98,65	97,78	29,36	30,83
2 Kab. Ponorogo	0,89	0,74	99,11	99,26	35,51	39,80
3 Kab. Trenggalek	2,48	2,29	97,52	97,71	29,20	29,80
4 Kab. Tulungagung	1,41	4,10	98,59	95,90	29,92	31,53
5 Kab. Blitar	2,10	1,61	97,90	98,39	32,76	31,27
6 Kab. Kediri	4,10	3,36	95,90	96,64	29,71	31,87
7 Kab. Malang	3,04	3,39	96,96	96,61	29,76	27,53
8 Kab. Lumajang	3,76	2,45	96,24	97,55	24,52	24,54
9 Kab. Jember	3,44	2,92	96,56	97,08	25,12	26,93
10 Kab. Banyuwangi	1,95	3,96	98,05	96,04	30,06	30,10
11 Kab. Bondowoso	1,87	2,29	98,13	97,71	24,47	24,82
12 Kab. Situbondo	4,35	4,52	95,65	95,48	23,64	26,05
13 Kab. Probolinggo	1,97	2,92	98,03	97,08	22,29	23,77
14 Kab. Pasuruan	5,05	5,69	94,95	94,31	24,10	23,85
15 Kab. Sidoarjo	7,74	8,33	92,26	91,67	28,57	29,63
16 Kab. Mojokerto	2,89	2,09	97,11	97,91	29,00	27,24
17 Kab. Jombang	2,80	4,73	97,20	95,27	27,95	27,98
18 Kab. Nganjuk	1,76	4,02	98,24	95,98	28,44	29,30
19 Kab. Madiun	0,39	1,47	99,61	98,53	42,27	38,88
20 Kab. Magetan	0,68	0,58	99,32	99,42	40,52	43,26
21 Kab. Ngawi	1,22	2,16	98,78	97,84	45,34	40,84
22 Kab. Bojonegoro	1,42	0,47	98,58	99,53	38,66	41,55
23 Kab. Tuban	3,55	3,56	96,45	96,44	31,08	33,01
24 Kab. Lamongan	1,07	3,60	98,93	96,40	31,34	33,70
25 Kab. Gresik	7,19	5,97	92,81	94,03	26,60	27,41
26 Kab. Bangkalan	9,30	5,11	90,70	94,89	21,36	22,87
27 Kab. Sampang	1,17	1,43	98,83	98,57	30,58	29,22
28 Kab. Pamekasan	2,47	3,81	97,53	96,19	24,08	26,28
29 Kab. Sumenep	1,13	3,45	98,87	96,55	27,53	24,85
71 Kota Kediri	8,90	8,94	91,10	91,06	29,03	29,79
72 Kota Blitar	6,60	5,69	93,40	94,31	32,92	31,31
73 Kota Malang	6,61	9,20	93,39	90,80	30,40	30,35
74 Kota Probolinggo	5,87	5,32	94,13	94,68	27,03	28,62
75 Kota Pasuruan	12,49	10,04	87,51	89,96	27,26	30,06
76 Kota Mojokerto	5,36	7,54	94,64	92,46	33,60	30,89
77 Kota Madiun	5,38	5,50	94,62	94,50	36,17	44,30
78 Kota Surabaya	24,40	27,88	75,60	72,12	24,73	24,52
79 Kota Batu	4,52	5,26	95,48	94,74	25,52	24,31
Jawa Timur	4,89	5,50	95,11	94,50	29,05	29,49

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Beton		Genteng		Asbes		Lainnya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	0,97	0,59	96,60	95,94	2,43	3,41	0,00	0,06
2 Kab. Ponorogo	1,44	2,58	97,88	96,24	0,60	0,93	0,08	0,25
3 Kab. Trenggalek	6,84	4,48	91,85	91,33	1,31	3,84	0,00	0,35
4 Kab. Tulungagung	0,75	0,00	96,83	98,30	2,25	1,70	0,18	0,00
5 Kab. Blitar	0,76	1,32	96,97	96,59	2,26	1,96	0,00	0,13
6 Kab. Kediri	0,82	2,74	96,55	93,18	2,38	3,00	0,25	1,09
7 Kab. Malang	4,06	2,98	90,20	91,94	5,58	4,26	0,17	0,83
8 Kab. Lumajang	1,29	1,68	96,95	94,55	1,67	2,86	0,09	0,91
9 Kab. Jember	0,82	0,83	98,84	97,78	0,22	1,08	0,11	0,30
10 Kab. Banyuwangi	0,59	0,70	96,58	95,93	1,60	2,85	1,23	0,51
11 Kab. Bondowoso	0,00	0,38	97,46	96,90	1,97	1,99	0,57	0,73
12 Kab. Situbondo	0,00	0,53	92,46	87,88	4,10	7,98	3,45	3,60
13 Kab. Probolinggo	0,00	0,18	97,05	93,54	2,89	5,03	0,06	1,25
14 Kab. Pasuruan	1,94	1,71	91,93	90,59	4,99	4,87	1,14	2,83
15 Kab. Sidoarjo	1,61	3,73	84,44	88,03	11,89	8,17	2,05	0,07
16 Kab. Mojokerto	0,51	3,24	95,01	93,82	4,48	2,63	0,00	0,30
17 Kab. Jombang	0,23	2,34	93,98	92,27	5,13	4,97	0,67	0,42
18 Kab. Nganjuk	1,81	1,93	96,86	94,06	1,33	3,25	0,00	0,77
19 Kab. Madiun	3,15	0,97	95,99	98,26	0,74	0,68	0,12	0,08
20 Kab. Magetan	0,90	0,82	98,25	97,53	0,50	1,57	0,35	0,07
21 Kab. Ngawi	0,00	0,00	99,49	99,30	0,16	0,53	0,35	0,17
22 Kab. Bojonegoro	0,58	0,66	98,57	97,56	0,85	1,02	0,00	0,77
23 Kab. Tuban	1,76	2,58	96,76	96,01	1,48	1,22	0,00	0,18
24 Kab. Lamongan	4,11	5,98	94,17	91,60	1,49	2,42	0,23	0,00
25 Kab. Gresik	2,62	5,39	88,30	86,38	8,92	7,51	0,15	0,72
26 Kab. Bangkalan	1,10	2,44	96,22	94,49	1,07	1,87	1,61	1,20
27 Kab. Sampang	0,23	1,68	99,75	97,99	0,02	0,33	0,00	0,00
28 Kab. Pamekasan	0,00	1,03	98,92	96,21	0,77	1,64	0,31	1,12
29 Kab. Sumenep	1,80	3,97	97,12	95,19	0,60	0,55	0,48	0,30
71 Kota Kediri	1,86	2,71	90,43	90,14	6,78	6,40	0,93	0,75
72 Kota Blitar	3,54	3,27	92,15	91,01	4,32	4,35	0,00	1,37
73 Kota Malang	1,47	6,06	91,67	84,81	5,64	6,77	1,22	2,37
74 Kota Probolinggo	0,00	0,16	99,77	97,93	0,23	1,91	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	0,65	1,24	95,97	96,65	3,26	2,11	0,12	0,00
76 Kota Mojokerto	1,14	1,60	87,43	90,60	10,62	6,94	0,82	0,86
77 Kota Madiun	0,80	1,13	94,13	95,51	4,21	2,20	0,86	1,16
78 Kota Surabaya	4,51	4,10	72,97	65,24	21,53	27,35	0,98	3,32
79 Kota Batu	10,21	8,33	82,37	83,55	6,04	5,26	1,37	2,86
Jawa Timur	1,73	2,34	93,23	91,76	4,48	4,99	0,55	0,91

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

	Kabupaten/Kota	Tembok/plester-an/anyaman bambu-kawat		Kayu/batang kayu		Bambu/anyaman bambu		Lainnya	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Pacitan	84,50	84,55	10,27	8,62	2,96	3,44	2,26	3,39
2	Kab. Ponorogo	94,21	95,45	1,72	1,83	3,78	1,56	0,29	1,16
3	Kab. Trenggalek	94,42	93,91	2,56	3,87	2,91	1,30	0,11	0,93
4	Kab. Tulungagung	94,40	94,62	1,21	0,76	4,38	4,07	0,01	0,54
5	Kab. Blitar	92,55	92,61	3,15	3,85	4,30	3,49	0,00	0,06
6	Kab. Kediri	98,85	98,03	0,20	0,32	0,95	1,55	0,00	0,10
7	Kab. Malang	94,02	95,05	1,90	1,77	3,64	2,86	0,44	0,32
8	Kab. Lumajang	92,69	94,23	0,64	1,84	5,67	2,95	1,00	0,97
9	Kab. Jember	86,10	90,28	2,82	1,66	10,87	7,96	0,21	0,10
10	Kab. Banyuwangi	90,71	94,44	0,89	1,29	7,91	4,17	0,49	0,09
11	Kab. Bondowoso	65,36	66,47	12,30	13,47	18,87	17,86	3,46	2,20
12	Kab. Situbondo	54,82	54,10	29,00	32,11	11,12	9,77	5,06	4,03
13	Kab. Probolinggo	81,09	80,26	5,77	8,65	5,51	3,90	7,64	7,19
14	Kab. Pasuruan	94,77	94,68	2,79	3,30	2,31	1,81	0,12	0,22
15	Kab. Sidoarjo	99,23	99,51	0,34	0,24	0,39	0,19	0,03	0,06
16	Kab. Mojokerto	93,39	94,23	1,79	2,12	4,35	3,51	0,47	0,14
17	Kab. Jombang	90,91	92,73	6,44	3,77	2,65	3,50	0,00	0,00
18	Kab. Nganjuk	92,20	93,07	6,49	5,23	1,30	1,15	0,00	0,56
19	Kab. Madiun	91,60	89,26	6,08	7,56	1,37	1,42	0,96	1,75
20	Kab. Magetan	99,64	99,31	0,36	0,13	0,00	0,56	0,00	0,00
21	Kab. Ngawi	60,78	59,06	35,27	36,76	3,59	3,84	0,36	0,34
22	Kab. Bojonegoro	48,26	49,20	46,00	44,85	5,30	4,91	0,44	1,03
23	Kab. Tuban	68,12	71,57	25,26	22,19	6,62	5,09	0,00	1,15
24	Kab. Lamongan	77,58	80,90	16,54	15,96	5,15	2,59	0,74	0,55
25	Kab. Gresik	91,73	89,51	7,99	7,93	0,28	1,45	0,00	1,11
26	Kab. Bangkalan	72,00	75,74	12,80	15,57	7,27	5,27	7,93	3,42
27	Kab. Sampang	55,36	63,23	32,31	22,97	7,94	6,90	4,39	6,89
28	Kab. Pamekasan	80,16	84,88	2,55	1,77	10,18	9,05	7,11	4,30
29	Kab. Sumenep	88,10	95,04	5,86	1,24	5,95	3,54	0,10	0,18
71	Kota Kediri	98,57	99,35	1,43	0,20	0,00	0,15	0,00	0,30
72	Kota Blitar	98,50	97,00	0,54	1,92	0,96	1,08	0,00	0,00
73	Kota Malang	98,52	99,09	0,60	0,18	0,77	0,52	0,12	0,21
74	Kota Probolinggo	98,60	96,68	0,44	2,61	0,96	0,70	0,00	0,00
75	Kota Pasuruan	97,84	99,76	1,33	0,23	0,83	0,00	0,00	0,00
76	Kota Mojokerto	97,46	96,83	0,00	0,21	2,54	2,70	0,00	0,27
77	Kota Madiun	98,13	98,04	1,18	1,09	0,69	0,87	0,00	0,00
78	Kota Surabaya	97,36	95,35	2,25	3,77	0,39	0,28	0,00	0,60
79	Kota Batu	96,29	98,65	1,67	0,82	1,43	0,29	0,61	0,24
	Jawa Timur	87,05	88,12	7,51	7,33	4,43	3,50	1,01	1,05

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 5 Persentase rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Bukan tanah		Tanah	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	88,81	88,74	11,19	11,26
2 Kab. Ponorogo	88,26	92,58	11,74	7,42
3 Kab. Trenggalek	92,42	93,46	7,58	6,54
4 Kab. Tulungagung	94,13	96,28	5,87	3,72
5 Kab. Blitar	95,58	95,98	4,42	4,02
6 Kab. Kediri	95,04	96,21	4,96	3,79
7 Kab. Malang	93,27	95,39	6,73	4,61
8 Kab. Lumajang	97,08	97,86	2,92	2,14
9 Kab. Jember	94,00	95,08	6,00	4,92
10 Kab. Banyuwangi	93,27	95,45	6,73	4,55
11 Kab. Bondowoso	85,22	84,90	14,78	15,10
12 Kab. Situbondo	81,90	80,74	18,10	19,26
13 Kab. Probolinggo	80,56	80,06	19,44	19,94
14 Kab. Pasuruan	93,04	94,99	6,96	5,01
15 Kab. Sidoarjo	99,83	99,25	0,17	0,75
16 Kab. Mojokerto	93,89	93,63	6,11	6,37
17 Kab. Jombang	92,83	93,63	7,17	6,37
18 Kab. Nganjuk	83,65	85,10	16,35	14,90
19 Kab. Madiun	86,51	85,18	13,49	14,82
20 Kab. Magetan	97,37	97,54	2,63	2,46
21 Kab. Ngawi	61,70	65,43	38,30	34,57
22 Kab. Bojonegoro	61,06	59,86	38,94	40,14
23 Kab. Tuban	76,81	77,94	23,19	22,06
24 Kab. Lamongan	86,34	90,29	13,66	9,71
25 Kab. Gresik	97,91	96,45	2,09	3,55
26 Kab. Bangkalan	87,42	86,45	12,58	13,55
27 Kab. Sampang	68,34	73,44	31,66	26,56
28 Kab. Pamekasan	82,60	81,33	17,40	18,67
29 Kab. Sumenep	92,17	95,19	7,83	4,82
71 Kota Kediri	98,78	98,54	1,22	1,46
72 Kota Blitar	99,44	100,00	0,56	0,00
73 Kota Malang	99,25	99,13	0,75	0,87
74 Kota Probolinggo	100,00	98,90	0,00	1,10
75 Kota Pasuruan	99,39	98,53	0,61	1,47
76 Kota Mojokerto	99,61	99,48	0,39	0,52
77 Kota Madiun	99,39	98,33	0,61	1,66
78 Kota Surabaya	99,80	98,87	0,20	1,13
79 Kota Batu	97,57	97,58	2,43	2,42
Jawa Timur	88,74	90,30	91,08	9,70

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB Rumah/
Bangunan Tempat Tinggal Terlulus per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	A d a								Tidak ada fasilitas BAB	
	Digunakan hanya ART sendiri		Digunakan bersama ART ruta lain tertentu		Di MCK Umum		ART tidak menggunakan		2017	2018
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	85,67	89,40	12,21	7,57	0,14	0,53	0,13	0,00	1,86	2,50
2 Kab. Ponorogo	81,99	84,38	10,47	8,42	0,61	0,00	0,00	0,00	6,93	7,20
3 Kab. Trenggalek	73,82	75,56	12,38	14,37	0,64	1,14	0,14	0,00	13,03	8,94
4 Kab. Tulungagung	85,43	86,16	8,31	7,33	0,43	0,42	0,00	0,00	5,83	6,10
5 Kab. Blitar	80,92	81,22	7,94	7,69	0,85	0,57	0,17	0,20	10,11	10,32
6 Kab. Kediri	82,95	85,79	6,80	6,09	0,67	0,95	0,05	0,00	9,54	7,18
7 Kab. Malang	87,36	88,25	6,93	6,64	0,33	0,18	0,00	0,21	5,37	4,73
8 Kab. Lumajang	73,53	82,13	6,39	5,09	0,84	0,34	0,26	0,00	18,98	12,44
9 Kab. Jember	58,80	59,57	10,03	7,95	0,98	1,45	0,30	0,61	29,89	30,42
10 Kab. Banyuwangi	72,78	74,24	7,70	5,07	0,96	1,24	0,11	0,18	18,45	19,27
11 Kab. Bondowoso	31,10	37,82	15,04	11,55	4,66	6,49	0,13	0,38	49,07	43,77
12 Kab. Situbondo	38,35	43,56	14,17	12,15	2,87	3,66	0,59	0,42	44,01	40,21
13 Kab. Probolinggo	50,33	52,15	15,14	13,08	1,99	1,00	0,42	0,28	32,11	33,48
14 Kab. Pasuruan	71,65	76,17	5,09	4,35	2,16	0,22	0,06	0,70	21,04	18,56
15 Kab. Sidoarjo	90,42	87,06	5,08	7,36	2,96	2,17	0,00	0,09	1,54	3,32
16 Kab. Mojokerto	81,07	84,98	5,50	5,99	0,69	0,40	0,20	0,38	12,55	8,25
17 Kab. Jombang	79,04	84,67	8,61	7,40	0,77	0,88	0,00	0,11	11,58	6,94
18 Kab. Nganjuk	79,62	78,63	11,90	11,67	0,80	0,35	0,00	0,00	7,68	9,35
19 Kab. Madiun	84,22	81,53	8,98	9,14	0,75	0,36	0,17	0,00	5,87	8,97
20 Kab. Magetan	90,30	89,37	4,54	4,97	0,18	0,70	0,00	0,00	4,98	4,95
21 Kab. Ngawi	76,26	73,83	16,11	15,82	0,40	0,66	0,00	0,18	7,23	9,51
22 Kab. Bojonegoro	77,53	80,36	9,14	9,44	0,43	0,43	0,14	0,00	12,76	9,77
23 Kab. Tuban	75,16	74,08	5,65	8,86	1,52	0,15	0,00	0,00	17,68	16,91
24 Kab. Lamongan	90,76	90,15	2,34	5,29	0,00	0,18	0,13	0,00	6,77	4,38
25 Kab. Gresik	90,71	91,00	5,65	6,54	2,45	1,32	0,00	0,00	1,19	1,14
26 Kab. Bangkalan	86,95	88,19	7,11	6,39	2,56	0,91	0,29	0,00	3,09	4,52
27 Kab. Sampang	68,41	73,28	14,73	15,65	0,24	0,42	0,00	0,10	16,62	10,56
28 Kab. Pamekasan	66,49	67,09	21,57	18,16	1,27	1,26	0,38	0,00	10,30	13,49
29 Kab. Sumenep	58,06	62,76	24,61	20,90	2,69	0,46	0,28	0,10	14,35	15,78
71 Kota Kediri	84,17	86,73	9,72	9,43	4,36	2,54	1,75	0,00	1,75	1,30
72 Kota Blitar	87,77	90,37	9,72	6,62	0,58	0,65	1,93	0,14	1,93	2,22
73 Kota Malang	80,54	78,34	17,28	19,49	0,35	0,89	1,83	0,00	1,83	1,28
74 Kota Probolinggo	78,87	80,71	9,63	8,51	4,70	3,89	6,59	0,27	6,59	6,62
75 Kota Pasuruan	74,15	83,15	9,14	6,96	8,60	4,31	8,12	0,00	8,12	5,57
76 Kota Mojokerto	87,39	90,06	9,92	7,20	2,52	2,21	0,16	0,00	0,16	0,52
77 Kota Madiun	83,49	87,65	14,66	10,70	1,37	1,39	0,49	0,00	0,49	0,26
78 Kota Surabaya	74,09	73,34	22,23	22,61	3,50	3,80	0,18	0,00	0,18	0,26
79 Kota Batu	95,08	93,86	2,12	4,54	1,23	0,00	1,44	0,00	1,44	1,60
Jawa Timur	75,71	77,11	10,48	9,98	1,47	1,22	0,11	0,15	12,23	11,54

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 7 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Jenis kloset					
	Leher angsa		Plengsengan		Cemplung/Cubluk	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	64,36	69,21	1,33	3,51	34,30	27,28
2 Kab. Ponorogo	87,18	90,84	0,73	2,38	12,09	6,78
3 Kab. Trenggalek	83,65	81,60	1,08	0,29	15,27	18,11
4 Kab. Tulungagung	89,66	89,07	2,73	3,13	7,61	7,80
5 Kab. Blitar	84,56	88,55	4,16	2,82	11,28	8,62
6 Kab. Kediri	89,91	90,13	1,85	1,65	8,24	8,22
7 Kab. Malang	88,81	90,91	3,65	3,69	7,54	5,40
8 Kab. Lumajang	88,07	89,00	1,86	1,64	10,07	9,36
9 Kab. Jember	94,07	93,75	0,99	2,31	4,93	3,94
10 Kab. Banyuwangi	94,69	98,72	3,03	0,22	2,27	1,06
11 Kab. Bondowoso	82,29	90,78	1,54	1,48	16,17	7,74
12 Kab. Situbondo	88,26	91,67	2,61	1,00	9,13	7,34
13 Kab. Probolinggo	81,91	82,25	5,25	1,93	12,84	15,82
14 Kab. Pasuruan	94,80	94,90	1,89	1,89	3,31	3,21
15 Kab. Sidoarjo	99,93	97,89	0,07	2,11	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	96,90	97,66	1,23	0,34	1,87	2,00
17 Kab. Jombang	97,30	96,46	0,82	2,05	1,88	1,49
18 Kab. Nganjuk	88,59	92,02	0,72	0,85	10,70	7,13
19 Kab. Madiun	95,37	94,55	0,83	1,37	3,80	4,07
20 Kab. Magetan	94,38	95,14	0,57	0,10	5,05	4,76
21 Kab. Ngawi	82,99	80,27	2,33	1,22	14,68	18,51
22 Kab. Bojonegoro	90,18	90,86	3,48	2,77	6,34	6,36
23 Kab. Tuban	89,76	92,22	1,50	0,51	8,74	7,27
24 Kab. Lamongan	95,38	99,11	3,10	0,47	1,52	0,42
25 Kab. Gresik	97,96	97,95	0,66	0,72	1,39	1,32
26 Kab. Bangkalan	47,34	58,65	1,84	7,16	50,82	34,18
27 Kab. Sampang	78,34	82,48	0,00	1,83	21,66	15,70
28 Kab. Pamekasan	87,34	89,69	1,82	3,74	10,84	6,57
29 Kab. Sumenep	72,29	75,62	2,44	4,89	25,27	19,49
71 Kota Kediri	99,16	99,41	0,42	0,14	0,42	0,44
72 Kota Blitar	99,56	100,00	0,44	0,00	0,00	0,00
73 Kota Malang	98,68	98,34	1,22	1,60	0,10	0,07
74 Kota Probolinggo	97,85	98,89	0,62	0,18	1,54	0,93
75 Kota Pasuruan	98,45	99,48	0,85	0,00	0,70	0,52
76 Kota Mojokerto	100,00	99,67	0,00	0,33	0,00	0,00
77 Kota Madiun	95,60	97,15	4,40	2,85	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	99,74	97,58	0,26	0,90	0,00	1,52
79 Kota Batu	99,31	98,82	0,49	1,18	0,19	0,00
Jawa Timur	90,37	91,51	1,74	1,91	7,89	6,58

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat Buang Air Besar untuk ART Sendiri atau Bersama per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Tempat pembuangan akhir tinja									
	Tangki/IPAL		Kolam/Sawah /Sungai/ Laut		Lubang tanah		Pantai/tanah lapang/kebun		Lainnya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	48,25	53,43	0,00	0,00	50,62	45,75	1,04	0,82	0,09	0,00
2 Kab. Ponorogo	81,21	87,18	0,84	0,27	17,80	12,18	0,14	0,37	0,00	0,00
3 Kab. Trenggalek	78,06	78,74	2,53	2,46	17,82	18,28	0,45	0,52	1,13	0,00
4 Kab. Tulungagung	88,62	85,49	1,74	5,49	9,19	8,98	0,45	0,04	0,00	0,00
5 Kab. Blitar	76,12	72,92	6,22	7,15	17,66	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kab. Kediri	87,75	84,81	2,62	2,67	9,63	12,18	0,00	0,14	0,00	0,21
7 Kab. Malang	64,67	59,84	2,86	2,52	32,47	37,51	0,00	0,05	0,00	0,09
8 Kab. Lumajang	66,62	71,27	5,30	2,84	27,68	24,92	0,15	0,46	0,25	0,52
9 Kab. Jember	87,45	79,65	4,01	5,77	8,39	12,98	0,00	0,65	0,15	0,95
10 Kab. Banyuwangi	90,42	85,81	4,86	8,77	3,96	5,10	0,10	0,00	0,66	0,32
11 Kab. Bondowoso	52,73	59,88	8,54	16,25	37,10	23,86	0,49	0,00	1,14	0,00
12 Kab. Situbondo	69,47	82,69	1,80	4,69	28,12	12,36	0,61	0,27	0,00	0,00
13 Kab. Probolinggo	69,39	64,87	1,91	4,85	27,45	29,40	1,11	0,59	0,15	0,29
14 Kab. Pasuruan	70,95	81,55	7,55	4,50	20,63	13,55	0,53	0,00	0,34	0,40
15 Kab. Sidoarjo	98,43	97,83	1,29	1,71	0,27	0,38	0,00	0,00	0,00	0,08
16 Kab. Mojokerto	93,82	91,96	2,74	3,18	3,22	4,86	0,22	0,00	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	96,26	93,68	1,54	1,64	2,20	4,24	0,00	0,00	0,00	0,43
18 Kab. Nganjuk	85,09	91,37	0,87	1,33	13,73	6,68	0,32	0,62	0,00	0,00
19 Kab. Madiun	92,82	90,09	1,64	0,99	5,54	8,57	0,00	0,36	0,00	0,00
20 Kab. Magetan	86,93	88,03	0,84	4,68	12,23	6,97	0,00	0,32	0,00	0,00
21 Kab. Ngawi	81,34	63,41	4,20	3,20	14,46	31,43	0,00	0,73	0,00	1,23
22 Kab. Bojonegoro	88,66	91,20	0,92	0,62	10,18	7,25	0,24	0,19	0,00	0,74
23 Kab. Tuban	80,77	90,27	3,13	0,71	14,50	8,44	1,06	0,58	0,53	0,00
24 Kab. Lamongan	90,21	98,21	2,69	0,71	6,00	1,08	0,20	0,00	0,90	0,00
25 Kab. Gresik	97,54	97,53	0,44	0,53	1,76	1,94	0,27	0,00	0,00	0,00
26 Kab. Bangkalan	40,73	43,80	0,55	0,94	56,83	52,58	1,88	1,25	0,00	1,44
27 Kab. Sampang	67,08	76,71	0,24	0,60	32,32	22,13	0,36	0,56	0,00	0,00
28 Kab. Pamekasan	23,06	19,51	1,91	3,96	73,19	74,99	1,67	0,44	0,17	1,09
29 Kab. Sumenep	19,90	21,52	2,69	1,29	75,20	75,86	2,21	1,11	0,00	0,22
71 Kota Kediri	95,58	97,85	2,54	1,18	1,88	0,68	0,00	0,00	0,00	0,30
72 Kota Blitar	96,71	97,33	1,94	1,82	1,35	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Kota Malang	85,27	87,99	12,26	9,91	0,76	1,64	0,00	0,00	1,71	0,46
74 Kota Probolinggo	95,02	93,95	2,86	5,68	1,67	0,36	0,24	0,00	0,21	0,00
75 Kota Pasuruan	92,30	92,15	7,40	7,59	0,27	0,26	0,00	0,00	0,03	0,00
76 Kota Mojokerto	95,93	96,16	4,08	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Kota Madiun	96,68	98,95	1,59	1,05	1,23	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
78 Kota Surabaya	98,57	92,04	1,43	6,17	0,00	1,30	0,00	0,06	0,00	0,42
79 Kota Batu	93,18	93,51	5,70	5,80	1,11	0,00	0,00	0,26	0,00	0,43
Jawa Timur	80,29	79,99	2,89	3,55	16,31	15,91	0,32	0,26	0,19	0,29

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 9 Persentase Rumah Tangga Dibedakan menurut Sanitasi Layak/Tidak Layak per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Penggunaan Sarana Sanitasi Layak		Penggunaan Sarana Sanitasi Tidak Layak	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	47,22	51,81	52,78	48,19
2 Kab. Ponorogo	74,80	80,68	25,20	19,32
3 Kab. Trenggalek	67,28	70,30	32,72	29,70
4 Kab. Tulungagung	82,37	78,62	17,63	21,38
5 Kab. Blitar	65,97	63,96	34,03	36,04
6 Kab. Kediri	78,45	77,23	21,55	22,77
7 Kab. Malang	60,12	56,41	39,88	43,59
8 Kab. Lumajang	52,15	61,13	47,85	38,87
9 Kab. Jember	59,97	52,35	40,03	47,65
10 Kab. Banyuwangi	70,36	68,06	29,64	31,94
11 Kab. Bondowoso	24,19	29,39	75,81	70,61
12 Kab. Situbondo	36,49	45,83	63,51	54,17
13 Kab. Probolinggo	44,04	39,76	55,96	60,24
14 Kab. Pasuruan	53,99	64,67	46,01	35,33
15 Kab. Sidoarjo	93,94	90,64	6,06	9,36
16 Kab. Mojokerto	81,04	83,65	18,96	16,35
17 Kab. Jombang	84,07	84,60	15,93	15,40
18 Kab. Nganjuk	77,87	82,16	22,13	17,84
19 Kab. Madiun	86,51	81,55	13,49	18,45
20 Kab. Magetan	82,17	82,46	17,83	17,54
21 Kab. Ngawi	74,13	56,69	25,87	43,31
22 Kab. Bojonegoro	76,20	79,28	23,80	20,72
23 Kab. Tuban	64,45	74,74	35,55	25,26
24 Kab. Lamongan	81,48	93,66	18,52	6,34
25 Kab. Gresik	93,97	94,41	6,03	5,59
26 Kab. Bangkalan	37,26	40,34	62,74	59,66
27 Kab. Sampang	55,77	67,88	44,23	32,12
28 Kab. Pamekasan	19,71	16,64	80,29	83,36
29 Kab. Sumenep	16,34	17,68	83,66	82,32
71 Kota Kediri	89,54	93,96	10,46	6,04
72 Kota Blitar	94,28	94,40	5,72	5,60
73 Kota Malang	83,20	84,86	16,80	15,14
74 Kota Probolinggo	83,88	83,49	16,12	16,51
75 Kota Pasuruan	76,58	83,04	23,42	16,96
76 Kota Mojokerto	93,35	93,36	6,65	6,64
77 Kota Madiun	90,81	94,51	9,19	5,49
78 Kota Surabaya	94,69	87,18	5,31	12,82
79 Kota Batu	90,37	90,85	9,63	9,15
Jawa Timur	68,60	68,84	31,40	31,16

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 10 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama untuk Minum									
	Air Dalam Kemasan		Leding/Pompa		Sumur/Mata Air Terlindung		Sumur/Mata Air Tak Terlindung		Air Permukaan/Hujan/Lainnya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	10,02	15,11	19,81	13,26	46,98	54,66	22,59	14,54	0,61	2,44
2 Kab. Ponorogo	15,69	19,22	42,24	47,25	36,61	26,88	5,45	6,16	0,00	0,49
3 Kab. Trenggalek	12,71	12,20	12,61	15,52	43,82	46,80	30,86	23,62	0,00	1,86
4 Kab. Tulungagung	19,54	20,17	33,34	35,67	45,81	43,58	1,30	0,58	0,00	0,00
5 Kab. Blitar	9,54	9,13	17,20	25,17	65,14	57,96	8,13	7,74	0,00	0,00
6 Kab. Kediri	13,29	11,15	60,27	63,57	22,95	21,65	3,50	3,63	0,00	0,00
7 Kab. Malang	5,87	6,35	30,81	31,77	59,76	56,13	3,55	5,21	0,00	0,54
8 Kab. Lumajang	6,86	5,44	21,83	26,43	68,15	63,36	2,26	3,57	0,91	1,20
9 Kab. Jember	14,50	12,46	22,55	23,38	55,47	56,37	7,48	6,12	0,00	1,66
10 Kab. Banyuwangi	19,38	22,36	30,17	38,01	44,60	35,26	5,64	4,12	0,20	0,23
11 Kab. Bondowoso	3,86	3,66	30,46	35,21	58,10	54,89	5,24	6,24	2,34	0,00
12 Kab. Situbondo	7,05	7,88	63,88	66,09	23,30	21,40	5,77	4,63	0,00	0,00
13 Kab. Probolinggo	9,39	11,14	54,65	52,31	31,06	27,76	4,32	6,74	0,57	2,04
14 Kab. Pasuruan	17,38	15,12	43,03	42,00	36,58	39,24	2,88	2,96	0,13	0,67
15 Kab. Sidoarjo	62,89	63,88	9,78	9,16	27,01	26,12	0,31	0,84	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	31,48	32,64	47,99	41,52	18,76	25,05	1,77	0,79	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	35,85	37,78	42,72	41,06	20,37	19,47	1,05	1,69	0,00	0,00
18 Kab. Nganjuk	21,40	27,05	54,97	57,58	22,16	10,39	1,47	4,99	0,00	0,00
19 Kab. Madiun	21,50	22,23	55,22	56,20	19,25	17,48	4,03	4,09	0,00	0,00
20 Kab. Magetan	11,95	12,80	44,77	44,56	42,55	41,86	0,73	0,64	0,00	0,14
21 Kab. Ngawi	25,56	29,58	39,85	32,69	32,16	35,00	2,42	2,73	0,00	0,00
22 Kab. Bojonegoro	37,64	44,54	42,08	41,76	18,99	7,78	1,29	5,91	0,00	0,00
23 Kab. Tuban	40,61	48,44	35,24	36,51	21,92	13,62	1,73	1,01	0,50	0,42
24 Kab. Lamongan	62,26	68,96	19,70	18,02	13,43	10,22	1,19	0,43	3,41	2,37
25 Kab. Gresik	84,78	88,67	8,05	7,27	6,91	3,13	0,00	0,14	0,26	0,79
26 Kab. Bangkalan	19,45	24,25	25,99	28,42	40,89	41,81	12,79	4,34	0,88	1,18
27 Kab. Sampang	12,70	12,98	22,28	31,47	36,44	39,16	22,69	11,82	5,88	4,57
28 Kab. Pamekasan	9,46	6,85	30,14	27,91	39,12	49,64	19,03	15,60	2,25	0,00
29 Kab. Sumenep	7,92	6,28	33,49	46,70	53,34	43,81	5,26	3,21	0,00	0,00
71 Kota Kediri	39,67	37,46	57,42	60,81	2,52	1,45	0,13	0,28	0,26	0,00
72 Kota Blitar	29,04	31,64	28,91	44,84	37,58	21,83	4,47	1,70	0,00	0,00
73 Kota Malang	42,54	44,15	46,12	44,02	11,34	11,40	0,00	0,14	0,00	0,29
74 Kota Probolinggo	45,74	49,44	54,02	50,17	0,24	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	44,25	38,22	54,08	60,09	1,53	1,69	0,14	0,00	0,00	0,00
76 Kota Mojokerto	68,58	67,75	30,83	32,26	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Kota Madiun	72,31	73,90	24,02	25,11	3,32	0,78	0,34	0,22	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	85,10	86,83	14,90	13,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Kota Batu	9,21	7,74	21,80	26,37	67,99	65,05	0,99	0,84	0,00	0,00
Jawa Timur	29,23	30,55	32,51	33,79	33,23	30,95	4,61	4,13	0,42	0,58

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 11 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018

Kabupaten/Kota	Jarak Sumber Air Minum (pompa,sumur,mata air) ke Tempat Penampungan Kotoran					
	< 10 m		≥ 10 m		Tidak Tahu	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	12,07	22,89	86,18	76,73	1,74	0,38
2 Kab. Ponorogo	29,09	18,24	68,73	80,93	2,17	0,83
3 Kab. Trenggalek	29,87	30,05	68,19	66,89	1,94	3,06
4 Kab. Tulungagung	35,56	39,14	61,78	59,99	2,66	0,86
5 Kab. Blitar	30,53	30,16	67,56	66,57	1,91	3,26
6 Kab. Kediri	35,66	36,58	59,80	61,79	4,54	1,63
7 Kab. Malang	23,01	23,93	69,92	72,15	7,07	3,93
8 Kab. Lumajang	30,41	29,19	61,74	62,43	7,85	8,38
9 Kab. Jember	35,24	44,02	61,92	49,29	2,84	6,69
10 Kab. Banyuwangi	26,67	30,55	70,53	65,87	2,80	3,58
11 Kab. Bondowoso	23,57	32,16	65,78	55,23	10,65	12,61
12 Kab. Situbondo	38,90	39,76	36,99	54,84	24,11	5,40
13 Kab. Probolinggo	33,67	40,58	59,43	55,39	6,91	4,03
14 Kab. Pasuruan	31,19	35,64	52,76	54,34	16,04	10,01
15 Kab. Sidoarjo	13,61	15,99	47,06	60,75	39,33	23,26
16 Kab. Mojokerto	40,33	36,86	57,84	60,87	1,83	2,27
17 Kab. Jombang	34,72	43,80	58,23	53,90	7,05	2,30
18 Kab. Nganjuk	32,74	32,26	65,25	65,03	2,02	2,71
19 Kab. Madiun	30,49	20,97	66,32	74,68	3,19	4,35
20 Kab. Magetan	21,09	23,84	77,95	75,85	0,96	0,31
21 Kab. Ngawi	24,69	29,91	68,67	67,86	6,64	2,23
22 Kab. Bojonegoro	26,08	28,56	73,40	69,30	0,52	2,14
23 Kab. Tuban	25,92	34,08	67,33	61,42	6,76	4,50
24 Kab. Lamongan	32,61	33,82	50,59	61,03	16,79	5,15
25 Kab. Gresik	9,88	10,00	81,58	81,93	8,54	8,07
26 Kab. Bangkalan	26,35	43,88	62,30	47,46	11,35	8,65
27 Kab. Sampang	10,51	10,83	85,49	88,18	3,99	1,00
28 Kab. Pamekasan	15,87	16,43	82,27	80,26	1,86	3,30
29 Kab. Sumenep	21,45	18,65	70,30	75,41	8,24	5,94
71 Kota Kediri	49,63	53,19	49,13	45,01	1,23	1,80
72 Kota Blitar	45,81	41,33	52,31	56,55	1,88	2,12
73 Kota Malang	30,13	49,53	58,65	48,60	11,21	1,87
74 Kota Probolinggo	43,51	38,13	52,61	56,73	3,88	5,14
75 Kota Pasuruan	42,71	37,04	49,80	56,07	7,49	6,89
76 Kota Mojokerto	58,44	48,03	38,37	43,53	3,19	8,44
77 Kota Madiun	56,52	44,98	37,09	50,78	6,40	4,24
78 Kota Surabaya	0,00	44,65	100,00	55,35	0,00	0,00
79 Kota Batu	6,42	3,77	83,82	83,72	9,76	12,50
Jawa Timur	28,56	31,44	64,53	63,60	6,90	4,96

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 12 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018

Kabupaten/Kota	Cara memperoleh air minum			
	Membeli		Tidak Membeli	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	27,51	23,21	72,49	76,79
2 Kab. Ponorogo	26,16	24,93	73,84	75,07
3 Kab. Trenggalek	18,20	15,45	81,80	84,55
4 Kab. Tulungagung	28,33	29,19	71,67	70,81
5 Kab. Blitar	25,62	18,48	74,38	81,52
6 Kab. Kediri	19,53	12,27	80,47	87,73
7 Kab. Malang	39,56	46,56	60,44	53,44
8 Kab. Lumajang	18,95	12,77	81,05	87,23
9 Kab. Jember	17,93	18,35	82,07	81,65
10 Kab. Banyuwangi	34,50	31,45	65,50	68,55
11 Kab. Bondowoso	12,12	27,37	87,88	72,63
12 Kab. Situbondo	17,71	15,54	82,29	84,46
13 Kab. Probolinggo	23,84	27,29	76,16	72,71
14 Kab. Pasuruan	32,76	33,08	67,24	66,92
15 Kab. Sidoarjo	91,21	85,95	8,79	14,05
16 Kab. Mojokerto	39,17	43,02	60,83	56,98
17 Kab. Jombang	40,79	41,28	59,21	58,72
18 Kab. Nganjuk	30,80	34,82	69,20	65,18
19 Kab. Madiun	36,90	30,24	63,10	69,76
20 Kab. Magetan	49,02	36,70	50,98	63,30
21 Kab. Ngawi	40,37	38,11	59,63	61,89
22 Kab. Bojonegoro	46,66	46,72	53,34	53,28
23 Kab. Tuban	61,96	54,10	38,04	45,90
24 Kab. Lamongan	75,65	76,19	24,35	23,81
25 Kab. Gresik	87,67	92,70	12,33	7,30
26 Kab. Bangkalan	25,81	31,46	74,19	68,54
27 Kab. Sampang	31,95	34,61	68,05	65,39
28 Kab. Pamekasan	21,36	19,24	78,64	80,76
29 Kab. Sumenep	26,10	36,30	73,90	63,70
71 Kota Kediri	44,75	38,94	55,25	61,06
72 Kota Blitar	33,03	38,14	66,97	61,86
73 Kota Malang	74,92	66,92	25,08	33,08
74 Kota Probolinggo	61,92	54,39	38,08	45,61
75 Kota Pasuruan	78,57	68,52	21,43	31,48
76 Kota Mojokerto	70,98	67,63	29,02	32,37
77 Kota Madiun	87,48	73,96	12,52	26,04
78 Kota Surabaya	96,86	91,71	3,14	8,29
79 Kota Batu	80,75	80,51	19,25	19,49
Jawa Timur	44,01	43,10	55,99	56,90

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 13 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak/Tidak Layak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Air Minum			
	Layak		Tidak Layak	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	72,45	69,49	27,55	30,51
2 Kab. Ponorogo	74,36	81,09	25,64	18,91
3 Kab. Trenggalek	70,00	52,59	30,00	47,41
4 Kab. Tulungagung	73,80	69,93	26,20	30,07
5 Kab. Blitar	61,22	68,08	38,78	31,92
6 Kab. Kediri	85,71	64,94	14,29	35,06
7 Kab. Malang	63,91	77,84	36,09	22,16
8 Kab. Lumajang	64,81	70,12	35,19	29,88
9 Kab. Jember	67,76	57,42	32,24	42,58
10 Kab. Banyuwangi	78,24	74,00	21,76	26,00
11 Kab. Bondowoso	56,63	64,01	43,37	35,99
12 Kab. Situbondo	80,19	61,99	19,81	38,01
13 Kab. Probolinggo	75,61	61,83	24,39	38,17
14 Kab. Pasuruan	69,67	66,00	30,33	34,00
15 Kab. Sidoarjo	91,01	91,13	8,99	8,87
16 Kab. Mojokerto	87,46	73,86	12,54	26,14
17 Kab. Jombang	90,58	71,70	9,42	28,30
18 Kab. Nganjuk	88,97	71,26	11,03	28,74
19 Kab. Madiun	87,70	81,97	12,30	18,03
20 Kab. Magetan	80,69	85,67	19,31	14,33
21 Kab. Ngawi	82,24	79,36	17,76	20,64
22 Kab. Bojonegoro	94,02	78,91	5,98	21,09
23 Kab. Tuban	86,36	81,98	13,64	18,02
24 Kab. Lamongan	81,22	75,52	18,78	24,48
25 Kab. Gresik	86,14	88,42	13,86	11,58
26 Kab. Bangkalan	79,04	60,54	20,96	39,46
27 Kab. Sampang	85,17	81,16	14,83	18,84
28 Kab. Pamekasan	88,09	71,13	11,91	28,87
29 Kab. Sumenep	74,33	79,79	25,67	20,21
71 Kota Kediri	95,22	68,78	4,78	31,22
72 Kota Blitar	80,43	72,39	19,57	27,61
73 Kota Malang	94,16	84,72	5,84	15,28
74 Kota Probolinggo	99,76	83,18	0,24	16,82
75 Kota Pasuruan	98,37	89,11	1,63	10,89
76 Kota Mojokerto	98,05	80,31	1,95	19,69
77 Kota Madiun	96,80	93,62	3,20	6,38
78 Kota Surabaya	95,43	96,29	4,57	3,71
79 Kota Batu	32,42	88,61	67,58	11,39
Jawa Timur	79,91	75,20	20,09	24,80

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 14 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama untuk Memasak									
	Air Dalam Kemasan		Leding/Pompa		Sumur/Mata Air Terlindung		Sumur/Mata Air Tak Terlindung		Air Permukaan/Hujan/Lainnya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	0,00	1,52	20,62	19,18	56,65	61,42	21,79	15,16	0,94	2,72
2 Kab. Ponorogo	0,09	1,19	54,74	62,58	38,77	29,75	6,11	5,93	0,29	0,54
3 Kab. Trenggalek	0,00	0,74	16,69	20,09	52,32	53,42	30,80	23,75	0,20	2,00
4 Kab. Tulungagung	0,15	0,29	44,68	47,73	54,02	50,36	1,16	1,27	0,00	0,35
5 Kab. Blitar	0,00	0,00	23,24	28,81	67,79	63,55	8,89	7,64	0,08	0,00
6 Kab. Kediri	0,60	0,93	69,55	71,04	25,99	23,96	3,86	4,07	0,00	0,00
7 Kab. Malang	0,53	0,12	34,04	34,53	60,94	60,11	4,15	4,11	0,35	1,12
8 Kab. Lumajang	0,26	0,72	23,42	29,32	71,54	66,54	2,64	2,21	2,13	1,20
9 Kab. Jember	1,07	0,38	20,82	24,99	64,98	65,98	9,49	6,16	3,64	2,50
10 Kab. Banyuwangi	0,00	0,24	38,61	52,16	51,89	41,33	6,12	4,42	3,38	1,84
11 Kab. Bondowoso	0,10	0,14	31,06	33,82	53,02	48,59	4,23	6,25	11,59	11,21
12 Kab. Situbondo	0,00	0,00	65,61	72,01	24,22	21,19	6,05	3,93	4,12	2,88
13 Kab. Probolinggo	0,07	0,41	61,69	62,13	27,59	28,82	3,14	5,60	7,51	3,04
14 Kab. Pasuruan	0,27	0,83	51,79	51,38	44,39	43,23	2,68	2,97	0,87	1,59
15 Kab. Sidoarjo	3,00	4,29	56,15	59,88	40,32	35,19	0,53	0,63	0,00	0,00
16 Kab. Mojokerto	1,13	2,06	75,48	67,31	21,00	28,67	1,94	1,82	0,46	0,14
17 Kab. Jombang	0,00	1,53	72,24	69,43	26,28	27,21	1,33	1,83	0,15	0,00
18 Kab. Nganjuk	0,19	0,90	72,03	81,63	26,41	12,35	1,37	4,82	0,00	0,30
19 Kab. Madiun	0,00	1,04	73,06	74,36	23,19	20,06	3,57	4,14	0,18	0,40
20 Kab. Magetan	0,62	0,45	53,06	51,33	45,83	47,47	0,50	0,62	0,00	0,14
21 Kab. Ngawi	1,50	1,01	57,34	54,28	38,35	42,08	2,81	2,24	0,00	0,39
22 Kab. Bojonegoro	0,00	1,05	72,53	80,46	25,60	12,85	1,87	5,64	0,00	0,00
23 Kab. Tuban	1,07	1,13	63,58	73,59	31,13	22,66	2,77	2,06	1,45	0,56
24 Kab. Lamongan	1,08	3,14	51,79	56,31	32,41	21,95	4,47	2,34	10,25	16,25
25 Kab. Gresik	0,00	3,12	70,89	72,15	21,08	13,50	1,22	1,99	6,81	9,24
26 Kab. Bangkalan	1,22	2,26	34,96	41,97	48,55	47,83	12,30	4,40	2,97	3,54
27 Kab. Sampang	0,22	0,07	27,57	34,68	36,29	46,56	24,19	12,53	11,73	6,16
28 Kab. Pamekasan	0,02	0,54	34,22	28,93	44,62	52,05	18,05	16,74	3,09	1,75
29 Kab. Sumenep	1,45	0,14	38,36	50,44	55,05	45,91	4,79	3,34	0,35	0,16
71 Kota Kediri	2,27	0,94	92,48	96,25	4,90	2,50	0,35	0,15	0,00	0,16
72 Kota Blitar	0,47	0,68	49,40	70,23	45,84	25,81	4,10	3,27	0,18	0,00
73 Kota Malang	0,00	1,31	85,00	81,89	14,90	15,54	0,10	0,71	0,00	0,55
74 Kota Probolinggo	0,00	0,00	99,22	98,74	0,78	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	0,51	0,00	96,18	96,08	2,62	3,92	0,18	0,00	0,51	0,00
76 Kota Mojokerto	1,49	2,89	97,18	96,12	1,11	0,83	0,22	0,00	0,00	0,15
77 Kota Madiun	2,25	0,92	91,47	95,51	5,66	3,23	0,62	0,22	0,00	0,13
78 Kota Surabaya	5,00	3,11	89,94	89,05	5,07	7,09	0,00	0,42	0,00	0,33
79 Kota Batu	0,00	0,00	24,90	29,50	73,56	70,06	1,54	0,44	0,00	0,00
Jawa Timur	0,93	1,22	53,21	56,28	38,87	36,27	4,97	4,25	2,02	1,98

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 15 Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Utama Untuk Memasak ke Tempat Penampungan Limbah Terdekat Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018

Kabupaten/Kota	Jarak Sumber Air Utama untuk Memasak (pompa,sumur,mata air) ke Tempat Penampungan Kotoran					
	< 10 m		≥ 10 m		Tidak Tahu	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	12,44	28,08	86,63	71,58	0,93	0,34
2 Kab. Ponorogo	33,37	18,62	64,12	80,28	2,50	1,10
3 Kab. Trenggalek	26,61	32,16	70,98	65,10	2,41	2,74
4 Kab. Tulungagung	33,64	40,12	64,20	58,94	2,16	0,94
5 Kab. Blitar	31,90	30,99	66,02	65,55	2,08	3,46
6 Kab. Kediri	34,07	37,23	61,05	61,31	4,88	1,46
7 Kab. Malang	21,46	24,45	69,58	71,57	8,95	3,98
8 Kab. Lumajang	32,48	30,26	60,58	61,14	6,95	8,60
9 Kab. Jember	38,30	44,02	59,53	50,36	2,17	5,62
10 Kab. Banyuwangi	30,94	30,62	65,95	66,27	3,11	3,10
11 Kab. Bondowoso	24,53	32,25	65,49	56,02	9,98	11,73
12 Kab. Situbondo	40,15	42,55	35,22	52,30	24,63	5,15
13 Kab. Probolinggo	37,64	39,46	56,29	56,45	6,07	4,08
14 Kab. Pasuruan	31,86	38,73	50,21	52,49	17,93	8,78
15 Kab. Sidoarjo	32,83	23,94	59,36	67,00	7,81	9,07
16 Kab. Mojokerto	39,86	37,32	58,50	59,13	1,64	3,55
17 Kab. Jombang	32,91	44,24	60,14	53,48	6,94	2,29
18 Kab. Nganjuk	32,09	30,19	66,57	66,67	1,34	3,14
19 Kab. Madiun	30,10	22,18	67,79	75,24	2,11	2,58
20 Kab. Magetan	20,32	23,54	79,20	76,19	0,49	0,27
21 Kab. Ngawi	28,97	29,75	66,42	68,09	4,60	2,16
22 Kab. Bojonegoro	29,06	31,48	69,59	66,98	1,35	1,54
23 Kab. Tuban	26,42	35,58	65,47	60,38	8,10	4,05
24 Kab. Lamongan	31,11	34,20	52,77	59,06	16,12	6,75
25 Kab. Gresik	16,19	19,33	74,94	76,97	8,87	3,70
26 Kab. Bangkalan	29,32	48,20	59,31	43,16	11,37	8,64
27 Kab. Sampang	13,73	11,16	82,34	87,06	3,93	1,79
28 Kab. Pamekasan	15,10	17,03	83,38	80,36	1,52	2,61
29 Kab. Sumenep	19,42	18,13	72,28	75,99	8,31	5,88
71 Kota Kediri	52,62	54,86	44,30	42,44	3,08	2,70
72 Kota Blitar	48,21	38,42	48,63	56,03	3,17	5,55
73 Kota Malang	28,46	40,72	52,40	43,20	19,15	16,08
74 Kota Probolinggo	48,11	41,28	49,46	54,06	2,43	4,66
75 Kota Pasuruan	46,83	38,98	43,66	54,67	9,50	6,34
76 Kota Mojokerto	52,69	49,50	38,72	43,00	8,59	7,49
77 Kota Madiun	40,54	39,73	47,36	51,71	12,10	8,56
78 Kota Surabaya	56,01	53,71	20,80	30,25	23,19	16,04
79 Kota Batu	2,95	3,62	88,54	84,77	8,51	11,61
Jawa Timur	30,37	32,65	63,05	62,62	6,58	4,74

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 16 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017-2018

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama											
	Listrik		Gas/Elpiji/Gas Kota		Minyak Tanah		Arang/Briket/Kayu		Lainnya		Tidak memasak	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kab. Pacitan	0,28	0,61	31,28	32,79	0,00	0,00	68,13	65,09	0,00	0,00	0,32	1,51
2 Kab. Ponorogo	2,25	1,34	55,85	56,98	0,00	0,00	40,63	40,53	0,00	0,00	1,27	1,15
3 Kab. Trenggalek	0,40	0,55	52,74	54,86	0,08	0,00	46,55	43,29	0,00	0,00	0,24	1,30
4 Kab. Tulungagung	1,95	0,41	75,08	77,24	0,00	0,00	21,52	21,79	0,00	0,00	1,45	0,56
5 Kab. Blitar	0,37	1,09	64,85	70,56	0,00	0,00	34,30	27,93	0,00	0,00	0,48	0,41
6 Kab. Kediri	1,03	0,52	79,60	79,44	0,30	0,14	17,61	18,70	0,00	0,05	1,46	1,14
7 Kab. Malang	0,29	0,60	74,07	77,83	0,15	0,20	24,41	20,70	0,00	0,00	1,09	0,67
8 Kab. Lumajang	0,00	0,00	64,08	73,93	0,09	0,13	34,63	25,58	0,00	0,07	1,20	0,29
9 Kab. Jember	0,12	0,62	72,56	70,03	0,00	0,00	25,48	28,15	0,00	0,00	1,84	1,20
10 Kab. Banyuwangi	0,55	0,12	77,83	82,33	0,12	0,26	19,72	16,05	0,00	0,00	1,79	1,24
11 Kab. Bondowoso	0,41	0,23	46,24	54,62	0,00	0,00	52,42	44,66	0,00	0,00	0,94	0,50
12 Kab. Situbondo	0,00	0,00	69,79	68,76	0,00	0,00	28,05	28,98	0,00	0,00	2,17	2,25
13 Kab. Probolinggo	0,69	1,14	64,40	62,29	0,00	0,17	34,48	36,24	0,11	0,00	0,32	0,16
14 Kab. Pasuruan	0,72	0,77	84,76	83,17	0,22	0,29	13,37	14,93	0,00	0,00	0,93	0,84
15 Kab. Sidoarjo	1,52	1,12	94,74	94,30	0,48	0,23	0,39	0,45	0,08	0,00	2,79	3,89
16 Kab. Mojokerto	0,17	0,37	92,70	94,34	0,20	0,24	4,95	3,50	0,00	0,10	1,97	1,44
17 Kab. Jombang	0,00	0,31	88,41	92,79	0,55	0,21	9,67	4,67	0,04	0,00	1,32	2,01
18 Kab. Nganjuk	0,23	0,13	82,74	81,67	0,19	0,20	16,26	16,60	0,00	0,00	0,59	1,39
19 Kab. Madiun	0,00	0,40	76,59	74,85	0,00	0,27	20,94	23,15	0,00	0,00	2,47	1,33
20 Kab. Magetan	0,34	2,43	82,65	80,89	0,30	0,00	15,78	14,84	0,00	0,00	0,94	1,84
21 Kab. Ngawi	0,24	0,23	65,12	67,16	0,00	0,00	32,78	31,42	0,00	0,00	1,85	1,18
22 Kab. Bojonegoro	0,00	0,48	70,97	70,82	0,16	0,21	27,00	27,12	0,00	0,00	1,87	1,36
23 Kab. Tuban	0,31	0,31	79,74	78,99	0,51	0,32	17,57	18,53	0,00	0,00	1,87	1,86
24 Kab. Lamongan	1,85	0,88	91,53	91,93	0,00	0,05	6,21	5,73	0,00	0,09	0,40	1,32
25 Kab. Gresik	0,09	1,40	95,24	93,83	0,38	0,44	1,00	0,59	0,14	0,00	3,16	3,72
26 Kab. Bangkalan	0,20	0,26	75,42	82,66	0,22	0,38	23,88	16,39	0,19	0,10	0,10	0,22
27 Kab. Sampang	0,18	0,00	56,81	64,76	0,04	0,00	42,88	35,04	0,00	0,00	0,09	0,20
28 Kab. Pamekasan	0,00	0,04	68,93	74,65	0,04	0,00	30,67	24,38	0,00	0,00	0,37	0,92
29 Kab. Sumenep	0,21	0,67	62,77	64,40	0,57	0,00	36,09	34,77	0,00	0,00	0,37	0,16
71 Kota Kediri	1,29	0,83	90,32	92,91	1,29	0,45	3,85	2,98	0,00	0,00	3,25	2,83
72 Kota Blitar	0,86	0,58	90,80	93,66	0,41	0,00	4,83	3,83	0,00	0,00	3,09	1,93
73 Kota Malang	0,00	2,28	90,26	90,37	0,84	0,61	1,11	1,03	0,00	0,00	7,79	5,71
74 Kota Probolinggo	0,27	0,03	89,95	93,39	0,41	0,25	7,42	5,27	0,00	0,00	1,94	1,06
75 Kota Pasuruan	0,21	0,00	97,06	95,51	0,62	0,83	0,37	1,20	0,00	0,00	1,75	2,46
76 Kota Mojokerto	0,00	0,00	95,90	97,52	0,65	0,57	0,55	0,00	0,00	0,00	2,89	1,91
77 Kota Madiun	2,69	1,12	89,90	91,12	1,58	1,24	1,28	1,74	0,00	0,00	4,56	4,77
78 Kota Surabaya	1,57	0,29	86,93	89,69	1,75	2,02	0,00	0,10	0,00	0,00	9,75	7,90
79 Kota Batu	0,00	0,68	98,76	97,79	0,00	0,00	1,13	1,18	0,00	0,00	0,11	0,35
Jawa Timur	0,60	0,61	76,59	78,21	0,33	0,30	20,32	18,95	0,02	0,01	2,15	1,91

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.

Tabel 17 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Sumber Penerangan Utama Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2017 – 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan					
	Listrik PLN		Listrik Non PLN		Lainnya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	99,86	99,56	0,00	0,00	0,15	0,44
2 Kab. Ponorogo	99,76	99,77	0,00	0,00	0,24	0,23
3 Kab. Trenggalek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kab. Tulungagung	99,90	99,77	0,00	0,12	0,10	0,11
5 Kab. Blitar	99,66	100,00	0,00	0,00	0,33	0,00
6 Kab. Kediri	99,85	99,86	0,00	0,14	0,15	0,00
7 Kab. Malang	99,77	100,00	0,07	0,00	0,16	0,00
8 Kab. Lumajang	98,58	100,00	1,26	0,00	0,16	0,00
9 Kab. Jember	99,65	99,05	0,27	0,39	0,07	0,56
10 Kab. Banyuwangi	98,67	99,14	1,33	0,73	0,00	0,13
11 Kab. Bondowoso	99,64	100,00	0,36	0,00	0,00	0,00
12 Kab. Situbondo	99,91	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00
13 Kab. Probolinggo	98,98	97,68	0,84	2,10	0,18	0,21
14 Kab. Pasuruan	99,71	99,91	0,23	0,09	0,06	0,00
15 Kab. Sidoarjo	99,94	99,91	0,06	0,00	0,00	0,09
16 Kab. Mojokerto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Kab. Jombang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Kab. Nganjuk	100,00	99,09	0,00	0,49	0,00	0,42
19 Kab. Madiun	99,85	99,91	0,00	0,00	0,15	0,09
20 Kab. Magetan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kab. Ngawi	99,91	99,50	0,00	0,00	0,10	0,50
22 Kab. Bojonegoro	98,72	99,54	1,29	0,12	0,00	0,33
23 Kab. Tuban	99,13	100,00	0,39	0,00	0,49	0,00
24 Kab. Lamongan	99,94	99,85	0,07	0,00	0,00	0,15
25 Kab. Gresik	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,09
26 Kab. Bangkalan	99,77	99,32	0,17	0,13	0,06	0,56
27 Kab. Sampang	99,91	99,61	0,00	0,16	0,09	0,23
28 Kab. Pamekasan	99,91	99,85	0,09	0,15	0,00	0,00
29 Kab. Sumenep	89,45	96,32	10,29	3,40	0,26	0,28
71 Kota Kediri	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Kota Blitar	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Kota Malang	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Kota Probolinggo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kota Pasuruan	99,53	100,00	0,47	0,00	0,00	0,00
76 Kota Mojokerto	99,68	99,91	0,31	0,09	0,00	0,00
77 Kota Madiun	99,77	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00
78 Kota Surabaya	100,00	99,74	0,00	0,11	0,00	0,16
79 Kota Batu	100,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,41
Jawa Timur	99,39	99,59	0,53	0,26	0,08	0,15

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret. 2017-2018.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jatim.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Kendangsari Industri 43-44,
Surabaya Telp. 031- 8439343

Fax. 031-8494007 Email : bps3500@bps.go.id

Website : <http://jatim.bps.go.id>

ISSN 178-623-1107N-5-1

